

PROFIL BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019



Jl. Khatib Sulaiman No.54 Padang
Telp.0751-40818
sumbar.bpk.go.id

Sekapur Sirih

“Harapan kami dengan kehadiran buku profil perwakilan ini dapat menggambarkan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan juga dapat mengenal lebih dekat BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat”



Assalaamu'alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera bagi kita semua

Jalan-jalan ke Pulau Sumatera
Singgahlah tuan di Bukittinggi
Assalamualaikum untuk semua
Izinkan saya memperkenalkan buku profil ini

Buku profil ini menyajikan secara khusus mengenai data dan informasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, kegiatan yang dilaksanakan, kinerja Sub Auditorat dan Sekretariat Perwakilan, serta entitas pemeriksaan di lingkup BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Melalui buku ini kami menggambarkan sejarah dan perkembangan administratif entitas di Sumatera Barat.

Harapan kami dengan kehadiran buku profil perwakilan ini dapat menggambarkan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan juga dapat mengenal lebih dekat BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pegawai pelaksana BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan berbagai pihak yang turut berpartisipasi dalam memberikan data dan informasi dalam mewujudkan penyusunan buku Profil ini.

Harum baunya buah kuini
Dibawa dari lubuk selasih
Demikianlah sekapur sirih ini
Mohon maaf dan terimakasih

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Padang, Maret 2020
Kepala Perwakilan

Yusnadewi S.E., M.Si., Ak., CSFA.

Daftar Isi

Sekapur Sirih	Informasi Pemeriksaan
Daftar Isi	Entitas Pemeriksaan
Sejarah dan Profil BPK	Provinsi Sumatera Barat
Arti dan Makna Lambang BPK RI	Kabupaten Dharmasraya
Hymne dan Mars BPK RI	Kabupaten Pesisir Selatan
Visi, Misi, Nilai-nilai Dasar dan Tujuan Strategis BPK RI	Kabupaten Sijunjung
Profil Pimpinan BPK RI	Kabupaten Solok
Selayang Pandang BPK Sumatera Barat	Kabupaten Solok Selatan
Kepala Perwakilan dari Masa ke Masa	Kota Pariaman
Pejabat Struktural BPK Sumatera Barat	Kota Sawahlunto
Struktur Organisasi	Kota Solok
Peta Strategi	Kabupaten Kepulauan Mentawai
Sasaran Strategis dan IKU BPK Sumatera Barat	Kota Padang
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Kabupaten Lima Puluh Kota
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	Kabupaten Padang Pariaman
Sekretariat Perwakilan	Kabupaten Pasaman
Subbagian Humas dan Tata Usaha Kalan	Kabupaten Pasaman Barat
Subbagian Sumber Daya Manusia	Kabupaten Tanah Datar
Subbagian Keuangan	Kota Bukittinggi
Subbagian Umum dan Teknologi Informasi	Kota Payakumbuh
Subbagian Hukum	Kota Padang Panjang
Subauditorat Sumbar I	Kabupaten Agam
Subauditorat Sumbar II	Galeri Foto

Redaksi

Pengarah	: Yusnadewi
Penanggungjawab	: Zaini Arief Budiman
Redaktur	: Rita Rianti
Tim Redaksi	: Della Nurul Amalia, Selly Kuntiardini, Meri Oktorita, Afdal Dasril, Fitra Infitar, Antoni Rizaldi Anwar, Lidya Fransiska, Dwitri Desvira, Halimah Fauziah, Nurbayti, Elvira Primashita



Tabuik



Pacu Jawi



Pacu Kudo



Randai

Sejarah

dan

Profil BPK

Sejarah BPK

Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

=== 1 Januari 1947 - Awal Pembentukan ===



Berdasarkan amanat UUD Tahun 1945 tersebut telah dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah No.11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara di kota Magelang. Pada waktu itu Badan Pemeriksa Keuangan hanya mempunyai 9 orang pegawai dan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pertama adalah R. Soerasno. Untuk memulai tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan dengan suratnya tanggal 12 April 1947

No.94-1 telah mengumumkan kepada semua instansi di Wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara, untuk sementara masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang dulu berlaku bagi pelaksanaan tugas Algemene Rekenkamer (Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda), yaitu ICW dan IAR.

=== 6 Nopember 1948 - Kedudukan di Yogyakarta ===

Dalam Penetapan Pemerintah No.6/1948 tanggal 6 Nopember 1948 tempat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta. Negara Republik Indonesia yang ibukotanya di Yogyakarta tetap mempunyai Badan Pemeriksa Keuangan sesuai pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945; Ketuanya diwakili oleh R. Kasirman yang diangkat berdasarkan SK Presiden RI tanggal 31 Januari 1950 No.13/A/1950 terhitung mulai 1 Agustus 1949.

=== 14 Desember 1949 - Dewan Pengawas Keuangan ===

Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949, maka dibentuk Dewan Pengawas Keuangan (berkedudukan di Bogor) yang merupakan salah satu alat perlengkapan negara RIS, sebagai Ketua diangkat R. Soerasno mulai tanggal 31 Desember 1949, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta. Dewan Pengawas Keuangan RIS berkantor di Bogor menempati bekas kantor Algemene Rekenkamer pada masa pemerintah Netherland Indies Civil Administration (NICA).

= 1 Oktober 1950 - Badan Pemeriksa Keuangan (UUDS 1950) =

Dengan kembalinya bentuk Negara menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, maka Dewan Pengawas Keuangan RIS yang berada di Bogor sejak tanggal 1 Oktober 1950 digabung dengan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUDS 1950 dan berkedudukan di Bogor menempati bekas kantor Dewan Pengawas Keuangan RIS. Personalial Dewan Pengawas Keuangan RIS diambil dari unsur Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta dan dari Algemene Rekenkamer di Bogor.



=== 5 Juli 1959 - Badan Pemeriksa Keuangan (UUD 1945) ===

Pada Tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekrit Presiden RI yang menyatakan berlakunya kembali UUD Tahun 1945. Dengan demikian Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan UUD 1950 kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Pasal 23 (5) UUD Tahun 1945.

Meskipun Badan Pemeriksa Keuangan berubah-ubah menjadi Dewan Pengawas Keuangan RIS berdasarkan konstitusi RIS Dewan Pengawas Keuangan RI (UUDS 1950), kemudian kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUD Tahun 1945, namun landasan pelaksanaan kegiatannya masih tetap menggunakan ICW dan IAR.

=== 12 Oktober 1963 - PERPU No. 6 Tahun 1964 ===

Dalam amanat-amanat Presiden yaitu Deklarasi Ekonomi dan Ambeg Parama Arta, dan di dalam Ketetapan MPRS No. 11/MPRS/1960 serta resolusi MPRS No. 1/Res/MPRS/1963 telah dikemukakan keinginan-keinginan untuk menyempurnakan Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga dapat menjadi alat kontrol yang efektif. Untuk mencapai tujuan itu maka pada tanggal 12 Oktober 1963, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 7 Tahun 1963 (LN No. 195 Tahun 1963) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang (PERPU) No. 6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Gaya Baru.

=== UU No. 5 Tahun 1973 - Badan Pemeriksa Keuangan ===

Untuk mengganti PERPU tersebut, dikeluarkanlah UU No. 17 Tahun 1965 yang antara lain menetapkan bahwa Presiden, sebagai Pemimpin Besar Revolusi pemegang kekuasaan pemeriksaan dan penelitian tertinggi atas penyusunan dan pengurusan Keuangan Negara. Ketua dan Wakil Ketua BPK RI berkedudukan masing-masing sebagai Menteri Koordinator dan Menteri.

Akhirnya oleh MPRS dengan Ketetapan No. X/MPRS/1966 kedudukan BPK RI dikembalikan pada posisi dan fungsi semula sebagai Lembaga Tinggi Negara. Sehingga UU yang mendasari tugas BPK RI perlu diubah dan akhirnya baru direalisasikan pada Tahun 1973 dengan UU No. 5 Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

== TAP MPR No.VI/MPR/2002 - Independen dan Profesional ==

Dalam era Reformasi sekarang ini, Badan Pemeriksa Keuangan telah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan Tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang Keuangan Negara, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR No.VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional.

Untuk lebih memantapkan tugas BPK RI, ketentuan yang mengatur BPK RI dalam UUD Tahun 1945 telah diamandemen. Sebelum amandemen, BPK RI hanya diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5). Kemudian dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat.

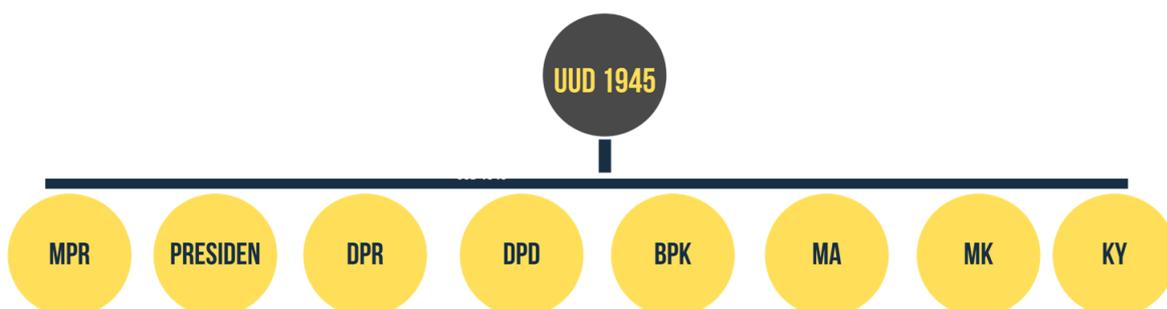
== Undang-Undang dibidang Keuangan Negara ==

Untuk menunjang tugasnya, BPK RI didukung dengan seperangkat Undang-Undang dibidang Keuangan Negara, yaitu;

- UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

== Kedudukan BPK RI ==

Kedudukan BPK RI dalam Organisasi Ketatanegaraan yang diatur dalam UUD 1945 sebagai berikut



Lambang BPK



Garuda Pancasila melambangkan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Lembaga Tinggi Negara menjunjung tinggi Pancasila sebagai satu-satunya azas Negara Kesatuan Republik Indonesia serta berkewajiban melestarikan Pancasila dan UUD 1945.

Motif Cakra melambangkan senjata yang dimiliki Batara Wisnu yang berfungsi sebagai senjata untuk menjaga ketentraman dunia dari angkara murka. Cakra merupakan bentuk utama Lambang Badan Pemeriksa Keuangan adalah sebagai alat Bangsa Indonesia untuk menjaga agar pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah selalu tertib, berdaya guna dan berhasil guna.

Tiga buah mata tombak melambangkan bahwa ruang lingkup Badan Pemeriksa Keuangan meliputi:

- ❖ Pemeriksaan atas penguasaan dan pengurusan keuangan serta ketaatan terhadap peraturan dan perundangan
- ❖ Pemeriksaan atas daya guna (efisiensi dan kehematan) ekonomi
- ❖ Pemeriksaan atas hasil program (efektifitas)

Empat puluh tujuh buah lengkung-lengkung kecil pada sisi bagian luar Cakra melambangkan tahun kelahiran Badan Pemeriksa Keuangan yaitu tahun 1947.

Bunga teratai berkelopak tujuh lembar yang menopang Cakra merupakan "Padmasana" yang berarti tahta bunga teratai melambangkan kesuburan lahir dan batin.

Makna Cakra ditopang oleh bunga teratai tersebut ialah Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Lembaga Tinggi Negara melaksanakan tugas konstitusionalnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan Lembaga-lembaga Tinggi lainnya, sehingga memberikan jaminan terhadap independensi dalam setiap kegiatan.

Tujuh lembar kelopak bunga teratai juga melambangkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan tugasnya senantiasa berlandaskan pada kode etik Sapta Prasetya Jati dan Ikrar Pemeriksa yang masing-masing berjumlah tujuh butir.

Warna Lambang Garuda Pancasila dan Cakra berwarna kuning emas, mempunyai makna keluhuran dan keagungan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Lembaga Tinggi Negara, sedangkan warna putih pada kelopak bunga teratai mempunyai makna kesucian, kebersihan, dan kejujuran.

Hymne BPK

**#Kami Sang Abdi Negara
Mengemban Tugas Mulia
Untuk Tanah Air Tercinta
Demi Bangsaku Indonesia**

**# Kami Siap Jiwa dan Raga
Mengabdikan Untukmu Negara
Tegar Takkan Pernah Gentar
Menjaga Harta Negara
Dengan Semangat Pancasila**

**Kami Sang Abdi Negara
Badan Pemeriksa Keuangan
Bersumpah dengan Hati yang
Kuat
Slalu Ada Untukmu Indonesia**

Back to #

Mars BPK

**#Wahai Sang Abdi Negara
Badan Pemeriksa Keuangan
Hayatilah dan Amalkan
Pengabdianmu**

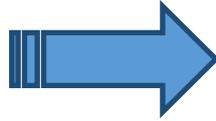
**Dengan Menjunjung Tinggi
Independensi
Integritas dan Profesionalisme
Memeriksa Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan
Negara**

**Demi Bangsaku Indonesia
Tanah Air Tercinta
Kami Siap Jiwa dan Raga
Mengabdikan untuk Negara**

**Tegar Takkan Gentar
Menjaga Mengayomi Harta
Negara
Dengan Semangat Pancasila**

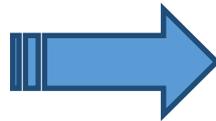
Back to #

Visi



Menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan [Berdasar Renstra 2020-2024]

Misi



- 1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri; dan**
- 2. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.**

Nilai Dasar

BPK RI dalam melaksanakan visi misinya dengan berlandaskan pada nilai-nilai dasar sebagai berikut:

Integritas

Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, obyektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

Independensi

Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

Profesionalisme

Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

Tujuan Strategis

Pencapaian Visi menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat yang akan dilaksanakan melalui misi BPK dengan melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri serta dengan melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional. Dalam memastikan tercapainya visi dan misinya, BPK RI menetapkan dua tujuan strategis yaitu:

Tujuan Strategis 1: Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara; dan

Tujuan Strategis 2: Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara

Sasaran Strategis

Dua tujuan strategis tersebut di atas dapat dicapai dengan melaksanakan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1:

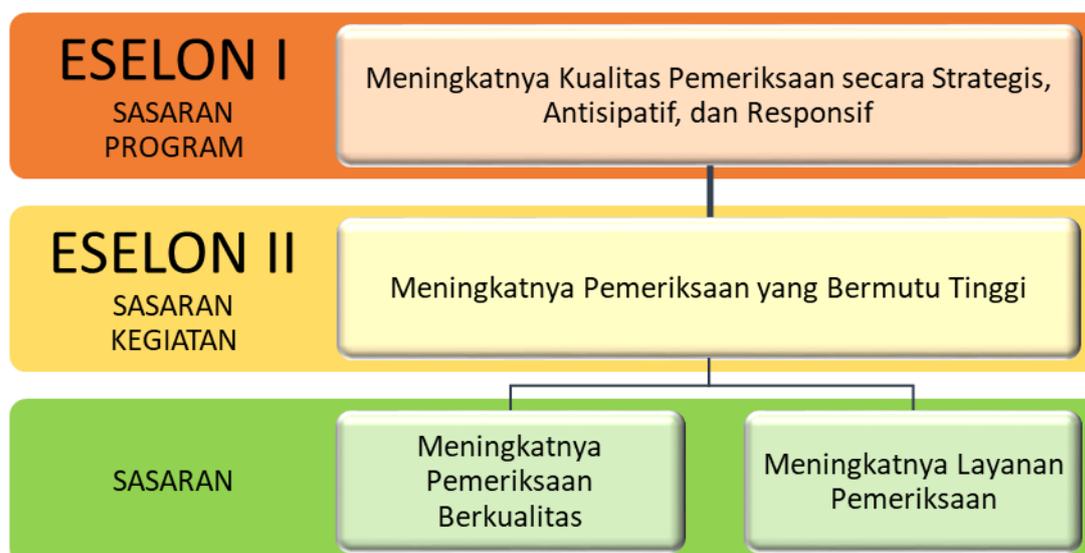
Meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan

Hasil pemeriksaan BPK dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan sesuai tugas dan wewenangnya. Pemangku kepentingan BPK terdiri dari lembaga perwakilan (DPD, DPD dan DPRD), pemerintah, warga negara Indonesia dan lainnya.

Sasaran Strategis 2:

Meningkatnya kualitas sistem pengendalian mutu

Penyelenggaraan sistem pengendalian mutu penting bagi BPK, sehingga hasil pemeriksaan dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan dan dapat menjadi rujukan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.



PROFIL PIMPINAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



Ketua dan Wakil Ketua BPK RI



Dr. Agung Firman Sampurna S.E., M.Si., CSFA

Tempat/Tgl. Lahir : Madiun, 19 November 1971

Menyelesaikan pendidikan doktor Bidang Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik di Universitas Indonesia tahun 2011 dan meraih gelar profesi Certified State Finance Auditor (CSFA) yang merupakan sertifikasi untuk pemeriksa keuangan negara.

Karier beliau dimulai dari Staf. Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi (1998 s.d. 1999). Lalu menjadi Fungsional Umum pada Pusat Kajian Manajemen Kebijakan LAN RI. Menjadi Anggota III BPK RI pada April 2012 s.d. Juli 2013, Anggota V BPK RI pada Juli 2013 s.d. Oktober 2014, Anggota I BPK RI pada Oktober 2014 s.d. Oktober 2019. Hingga menjadi Ketua BPK sejak Oktober 2019 s.d. sekarang.

Meraih penghargaan Bintang Mahaputera Nararya yang diberikan oleh Presiden RI pada Oktober 2014. Serta meraih Bintang Kartika Eka Paksi yang diberikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat pada Oktober 2019.

Dr. Agus Joko Pramono, S.ST., M.Acc., Ak., CA., CPA, CSFA

Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 1 Agustus 1972

Menyelesaikan pendidikan doktor Bidang Ilmu Doktoral Ilmu Pemerintahan di FISIP Universitas Padjajaran dan meraih gelar profesi Certified State Finance Auditor (CSFA) yang merupakan sertifikasi untuk pemeriksa keuangan negara.

Karier beliau dimulai dari Supervisor KAP tahun 1998 s.d. 1999, Internal Advisor PT. Banten Java Persada (Bukaka Group) tahun 2000 s.d. 2001, Manager Pusat Pengembangan Akuntansi STAN tahun 2001 s.d. 2005, Anggota Komite Audit PT Pelabuhan Indonesia III tahun 2005 s.d. 2012, Tenaga Ahli Bidang BUMN/BUMD dan Kekayaan Negara yang Dipisahkan tahun 2012 s.d. 2013, Anggota II BPK RI, Oktober 2014 s.d. Oktober 2019. Hingga menjadi Wakil Ketua BPK sejak Oktober 2019 s.d. sekarang.



Anggota/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI



Anggota I BPK /
Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I
Dr. Hendra Susanto M. Eng., M.H., CSFA, CFrA



Anggota III BPK /
Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III
Dr. Achsanul Qosasi, CSFA



Anggota V BPK /
Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V
Prof. Dr. Bahrullah Akbar M.B.A., CPA, CSFA



Anggota VII BPK /
Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII
Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA



Anggota II BPK /
Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II
Dr. Pius Lustrilanang S.IP., M.Si., CSFA



Anggota IV BPK /
Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV
Ir. Isma Yatun, M.T., CSFA



Anggota VI BPK /
Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI
Prof. Harry Azhar Azis M.A., Ph.D., CSFA

Tari Piring



Tari Payung

Tari Indang



Tari Lilin

Tari Pasambahan





Selayang Pandang BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Memenuhi amanat UUD 1945 serta UU No. 15 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa BPK berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi, maka BPK melakukan pembukaan Kantor Perwakilan di Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Padang.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat merupakan perluasan lingkup dari salah satu Sub Auditorat yang semula berada pada lingkup wilayah kerja BPK Perwakilan Sumatera Utara, sesuai dengan Keputusan BPK No.39/K/I-VIII.3/7/2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mulai beroperasi di Jalan Kuini No. 79 Padang pada tanggal 10 Oktober 2007 dan diresmikan pada tanggal 26 Oktober 2007 oleh Ketua BPK, Prof. Dr. Anwar Nasution. Pada bulan September 2009 terjadi gempa bumi, sehingga kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pindah ke Jalan Kali Serayu No. 11 Padang. Selanjutnya pada tanggal 7 Oktober 2010 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (hingga sekarang) menempati gedung baru di Jalan Khatib Sulaiman No. 54 Padang, yang diresmikan secara langsung oleh Ketua BPK, Hadi Purnomo.

Prestasi yang Dicapai

(dalam 5 tahun terakhir)

2020

- Tim Terbaik Pertama Penilaian Kualitas LHP LK Tahun 2019 kepada Tim Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman TA 2017 di Jakarta tanggal 20 Januari 2020.

2019

- Juara Pertama Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) Terbaik di BPK yang disampaikan oleh Anggota V BPK RI pada Rapat Koordinasi Kehumasan di Bali tanggal 22 Maret 2019, PIK BPK Perwakilan Sumatera Barat dapat dijadikan contoh bagi perwakilan lain untuk membuat publik area, dimana PIK disatukan dengan perpustakaan sehingga area tersebut memang optimal untuk pelayanan publik
- Peringkat pertama Keterbukaan Informasi Publik untuk kategori Instansi Vertikal pada acara Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Sumatera Barat Tahun 2019 di Padang tanggal 6 Desember 2019
- Anugerah *Achievement Motivation Person* tahun 2019 kepada Ibu Yusnadewi di Padang tanggal 6 Desember 2019
- Penghargaan Satker pengelola aset terbaik keempat di wilayah kerja KPKNL Padang dari Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau pada tanggal 17 Oktober 2019.
- Badan Publik Informatif dalam keterbukaan informasi publik kategori instansi vertikal.

2018

- Predikat WILAYAH BEBAS dari KORUPSI (WBK) di Jakarta tanggal 10 Desember 2018, Hasil Reviu dan Penilaian atas Implementasi Pembangunan Zona Integritas oleh KEMENPAN dan RB
- Peringkat Kedua Keterbukaan Informasi Publik Kategori Instansi Vertikal Se-Sumatera Barat Tahun 2018 di Padang tanggal 11 Desember 2018, Hasil Reviu dan Penilaian dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

2017

- Peringkat I hasil Penilaian Kinerja anggaran Tingkat Kementerian Negara/Lembaga Semester II Tahun 2016 Kategori Pagu Belanja s.d. Rp100 miliar lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumbar
- Juara Ketiga Keterbukaan informasi Publik Peringkat Sumatera Barat Tahun 2017, Kategori Instansi Vertikal dalam acara Anugerah Pemingkatan Badan Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat

2016

- Peringkat I hasil Penilaian Kinerja anggaran Tingkat Kementerian Negara/Lembaga Semester I Tahun 2016 Kategori Pagu Belanja modal s.d. Rp20 miliar lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumbar
- Peringkat II hasil Penilaian Kinerja anggaran Tingkat Kementerian Negara/Lembaga Semester I Tahun 2016 Kategori Pagu Belanja modal s.d. Rp20 miliar lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumbar
- Pemenang Ketiga Lomba LHP Kinerja Terbaik Tahun 2016

Inovasi yang Dilakukan

No.	Inovasi	Uraian	Tujuan dari Inovasi	Unit Kerja Terdampak
1	Balai Basuo: Wajah Baru PIK BPK Sumbar	<p>Peresmian Balai Basuo tanggal 11 Oktober 2018 menandai dimulainya langkah terobosan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk mengoptimalkan sarana PIK yang ada menjadi tempat untuk melakukan transfer knowledge antara BPK dengan para pemangku kepentingan.</p> <p>Di Balai Basuo terdapat ruang PIK (Pusat Informasi dan Komunikasi) sebagai bentuk pelayanan BPK kepada masyarakat dan juga terdapat perpustakaan dengan penampilan baru.</p> <p>Balai Basuo juga menjadi tempat berkumpul dan bertemu para pegawai untuk berbagi seperti kegiatan KTF (Knowledge Transfer Forum), diskusi dan kegiatan sharing lainnya.</p>	Dengan membangun komunikasi yang lebih dekat, terbuka, dalam suasana pembelajaran, diharapkan akan mampu mendorong pemenuhan harapan para pemangku kepentingan dan sekaligus mendorong pencapaian salah satu sasaran strategis BPK untuk meningkatkan pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan.	Subbag Humas dan TU Kalan
2	BPK Mendengar	<p>Salah satu peran BPK adalah mengelola efektivitas kerja sama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan, terutama dalam kaitannya untuk meningkatkan kemampuan BPK.</p> <p>Untuk menjembatani para pemangku kepentingan dalam memberikan masukan, saran, tanggapan, dan kritikan terhadap BPK, dilaksanakan kegiatan "Forum BPK Mendengar, yang dilaksanakan dengan berkunjung kepada pimpinan DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah beserta jajarannya bebas memberi masukan terkait pemeriksaan dan LHP BPK.</p>	Kegiatan "Forum BPK Mendengar" ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan BPK ke depan. BPK berusaha terus melakukan perbaikan-perbaikan sehingga manfaat pemeriksaan BPK bagi masyarakat terus meningkat.	Subbag Humas dan TU Kalan
3	Sahabat BPK	Forum ini merupakan wujud nyata BPK Provinsi Perwakilan Sumatera Barat yang memberikan kesempatan kepada para mahasiswa sebagai salah satu	Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk mengenal lebih dekat BPK, menebar manfaat, pengetahuan yang	Subbag Humas dan TU Kalan

No.	Inovasi	Uraian	Tujuan dari Inovasi	Unit Kerja Terdampak
		<p>pemangku kepentingan yang dinilai memiliki keterikatan dan ketertarikan serta mampu berperan sebagai public relation BPK. Kegiatan yang dilaksanakan dalam Forum Sahabat BPK berupa Forum Knowledge Sharing, yaitu pengenalan BPK kepada masyarakat khususnya mahasiswa melalui berbagai kegiatan dan publikasi BPK di media.</p>	<p>diperoleh untuk pemahaman yang lebih baik terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/ daerah dari perspektif peran, tugas dan tanggung jawab BPK.</p>	
4	Sharing Session	<p>Karena menyadari pentingnya keterbukaan informasi bagi publik, BPK Perwakilan Sumatera Barat berinovasi dengan menghadirkan pelayanan publik yang lebih transparan, informatif dan terbuka. PIK tidak lagi hanya untuk melayani permintaan data dan pengaduan masyarakat namun juga merupakan tempat untuk mengadakan berbagai kegiatan, misalnya Sharing session yang merupakan salah satu bentuk tanggungjawab BPK dalam memperkuat peranan pengawasan dan peningkatan tata kelola keuangan daerah.</p> <p>BPK memfokuskan kegiatan sharing session dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) khususnya dengan materi-materi pemeriksaan yang pernah dilakukan oleh BPK.</p>	<p>Kegiatan “Sharing Session” ini bertujuan untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK sehingga tercapai salah satu sasaran strategis BPK.</p>	Subbag Humas dan TU Kalan, Subauditorat
5	Perpustakaan Riset Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara	<p>Perpustakaan Riset Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat adalah hasil konversi Perpustakaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menjadi perpustakaan riset.</p> <p>Perpustakaan Riset Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terintegrasi dengan PIK sehingga disebut Balai Basuo. Perpustakaan BPK juga bekerja sama dengan Pusat Informasi dan Komunikasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk membuka akses publik terhadap laporan hasil pemeriksaan</p>	<p>Tujuan dari Perpustakaan Riset Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat meningkatkan kunjungan dari peneliti mahasiswa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, meningkatkan jumlah penelitian yang berkaitan dengan tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara, meningkatkan mutu penelitian tata kelola dan akuntabilitas keuangan</p>	Subbag Humas dan TU Kalan

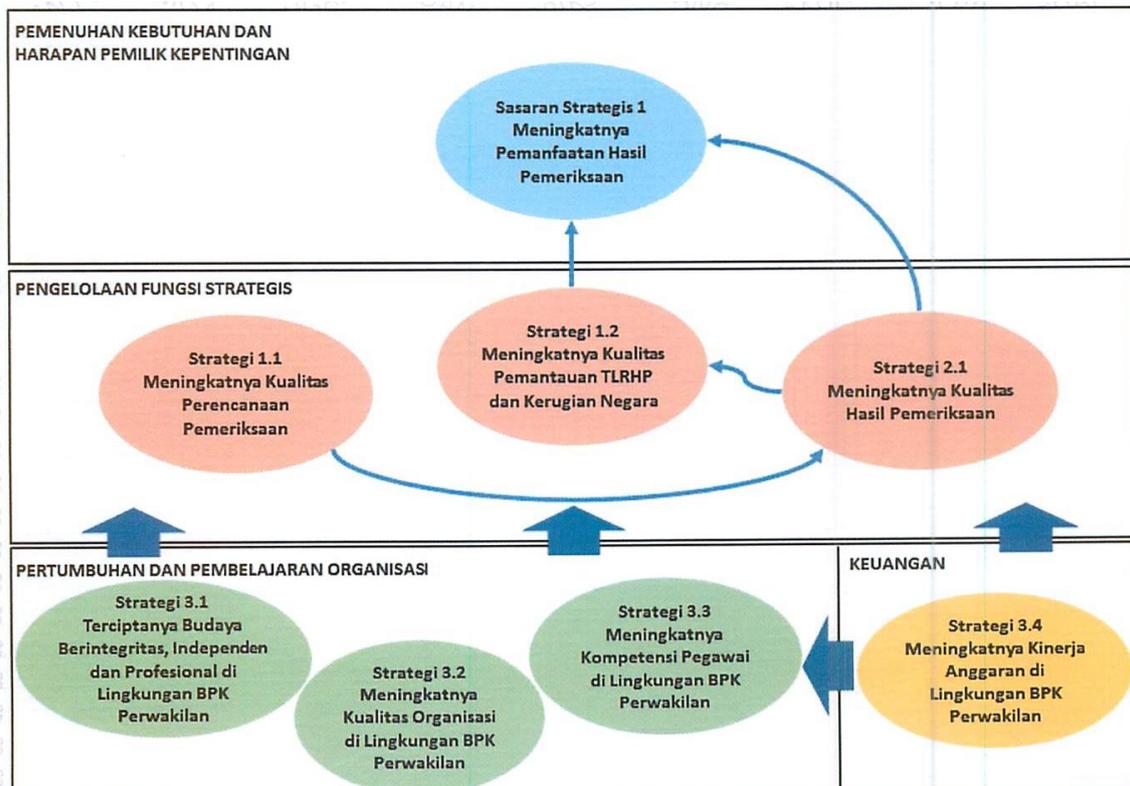
No.	Inovasi	Uraian	Tujuan dari Inovasi	Unit Kerja Terdampak
		BPK sebagai bahan riset.	negara.	
6	Rangkiang Data	<p>BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat membuat suatu database informasi yang berisi mengenai informasi keuangan daerah yang telah diaudit oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu terinspirasi dari Rangkiang, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat membuat suatu wadah yang disebut "Rangkiang Data" dimana didalamnya terdapat berbagai data mengenai keuangan daerah pada 20 entitas di Sumatera Barat.</p> <p>Rangkiang Data merupakan bentuk komitmen BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan memaksimalkan pelayanan kepada publik.</p>	Dengan adanya Rangkiang Data ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam memperoleh data keuangan dan dapat digunakan oleh seluruh pengguna layanan informasi publik yang ada di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.	Subbag Humas dan TU Kalan
7	Buku Tamu Digital	BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah membuat program pengadministrasian tamu berbasis database menggunakan Microsoft Access yang membantu Resepsionis mengadministrasikan tamu, mempermudah pencarian database nama tamu apabila diperlukan dan melaporkan pada Subbagian terkait serta membuat program pengadministrasian tidak membutuhkan kertas.	Dengan telah dibuatnya Buku Tamu Digital, dapat memudahkan Resepsionis dalam mengadministrasian tamu, mempermudah pencarian database dan melaporkan pada Subbagian terkait. Dari Buku Tamu Digital sudah dapat diketahui jumlah tamu yang berkunjung selama tahun 2019, dan memudahkan mencari nama tamu jika dibutuhkan.	Subbag Humas dan TU Kalan
8	Informasi Digital BPK dari Masa Ke Masa	Salah satu informasi publik yang dapat dilihat di ruang PIK adalah informasi mengenai BPK Sumbar dari masa ke masa. Mengikuti perkembangan teknologi, informasi ini dikemas dalam bentuk informasi digital yang tertuang dalam sebuah media interaktif berupa layar sentuh.	BPK dari masa ke masa memberikan informasi kepada siapa saja yang berkunjung ke Balai Basuo didukung dengan foto-foto yang membantu menceritakan detail kejadian-kejadian selama BPK Sumbar berdiri.	Subbag Humas dan TU Kalan
9	Program	Program "Pusako" atau Pelatihan Untuk Siap Bakarajo adalah	Tujuan Program Pusako adalah untuk mengenalkan	Subbag SDM

No.	Inovasi	Uraian	Tujuan dari Inovasi	Unit Kerja Terdampak
	Pusako - Pelatihan Untuk Siap Bakarajo	<p>program magang yang dibuka oleh BPK Perwakilan Sumbar untuk CPNS atau pelajar SMA/ sederajat, dan Mahasiswa yang diluncurkan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, skill dan pengenalan lingkungan kerja ke peserta magang dengan bimbingan mentor terbaik di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.</p> <p>Program Pusako adalah wujud kepedulian BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk membantu menyiapkan talenta yang memiliki nilai lebih dengan memberikan keterampilan peserta agar lebih siap memasuki dunia kerja dan memberikan kontribusi positif saat bekerja dimanapun.</p>	<p>peserta tentang tuntutan lingkungan kerja, misal aktivitas rutin dalam menyelesaikan pekerjaan, kualitas kerja, jam kerja, kedisiplinan, cara dan etika memberikan layanan kepada konsumen/tamu/stakeholders, komunikasi dengan sesama pegawai dan dengan pimpinan.</p>	<p>dan Subbag Humas dan TU Kalan</p>

Peta Strategis

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan Satuan Kerja Eselon II dibawah AKN V mendukung pencapaian Sasaran Strategis AKN V yang dapat dijelaskan dalam gambar Peta Strategi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dibawah ini :



Gambar Peta Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target pencapaian IKU secara periodik (tahunan). IKU beserta target pencapaiannya tersebut dituangkan dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK).

Target dan Realisasi Pencapaian Kinerja Tahun 2019

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2019 memperoleh skor pencapaian kinerja **100.76**. Skor ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan pencapaian skor Tahun 2018 yaitu 97,93.

Rincian pencapaian indikator kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel Target dan Realisasi Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

IKU	Uraian	Realisasi 2019	Target 2019	Capaian		
				2018	2017	2016
Score Kinerja Perwakilan Provinsi Sumatera Barat		100.76		97,93	99,79	102,52
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan						100.56
IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75,92 %	75%	62,16%	61,24%	64,41%
IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	100%	0%
IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	101%	100%	105%	103%	100%
IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	1	1	3
Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan						101.36
IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	100%	95%	100%	85%	85%
IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	25%	24%	23,33%	19,35%	24,32%
IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100%	100%	100%	84%	84%
Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara						100
IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	40	40	40	40	40
IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%	100%	100%
Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan						101
IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	4,78	3,90	4,74	4,58	4,51
IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100%	98,04%	100%
IK 2.1.4	Persentase LHP Yang Digugat dan Dinyatakan Menang	100%	100%	100%	100%	-
Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan Perwakilan						94.92
IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK	4,59	5,00	3,83	-	-
IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	4,75	5,00	4,67	-	-

IKU	Uraian	Realisasi 2019	Target 2019	Capaian		
				2018	2017	2016
IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%	100%	100%	-
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan						99,26
IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	A	AA	BB	A	A
IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	99,34%	95%	97,82%	67,72%	82,11%
IK 3.2.3	Jumlah <i>Best-Practice</i> yang Disusun	1	1	1	0	0
IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	100%	100%	100%	0	0
IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan <i>Output</i> dan Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%
IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	95,04%	95%	93,35%	93,85%	91,95%
IK 3.2.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	4	2	2,9	2,4	2,6
Strategi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan						100
IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100%	100%	100%
IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%	100%	100%	100%	100%
Strategi 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan						105
IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	88,31	80	75,12	86,40	90,97

Kepala Perwakilan

dari Masa ke Masa

Kepala Perwakilan (Periode Oktober 2007 s.d. Maret 2011)

Drs.H. Maulana Ginting, M.Si. (Pembina Utama Muda/IV C)



Bapak Maulana Ginting lahir di Medan, 5 Oktober 1961, memiliki seorang Istri drg.Trelia Boel, M.Kes, Sp.RKG. dan dua orang anak yaitu Aulia Rizki dan Dinda Maurelova.

Riwayat Pekerjaan : Administrasi Umum di Perwakilan BPK RI di Medan 1986, Pemeriksa Muda pada Perwakilan BPK RI di Medan 1987, Pengukuhan Pemeriksa Muda Perwakilan RI di Medan 1994, Pemeriksa Muda pada AKN IV Medan 1994, Kepala Seksi Departemen Dalam Negeri pada Auditama Keuangan Negara IV 1996, Pemeriksa pada Angk.IV 1996, Kepala Seksi Pertamina-2 pada AKN V 1997, Pembebasan Sebagai Auditor Ahli Muda 1997, Kepala Seksi Provinsi Dati I Riau pada Pwk.I di Medan 1999, Kepala Sub Auditorat Perwakilan I-A 2001, Kepala Perwakilan BPK Provinsi NAD 2005, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007.

Kepala Perwakilan (Periode Maret 2011 s.d. September 2015)

Betty Ratna Nuraeny, S.H. (Pembina Utama Madya/IV D)



Ibu Betty Ratna Nuraeny lahir di Sumedang, 11 Maret 1957, memiliki Suami Deddy Lufti Amin dan tiga orang anak yaitu Amelia Safitri, Widya Fitriani dan Kartika Fitriyanti.

Riwayat Pekerjaan : Administrasi Umum di Auditorat ODIT D pada BPK RI Pusat 1984, Pemeriksa Muda di Auditorat ODIT D 1986, Pemeriksa di Auditorat ODIT 1993, Kasub Bagian Sekretariat Irtama Wasinsus 1994, Pemeriksa di Inspektorat Litbang 1994, Auditor Ahli Muda 1997, Kepala Unit Pemeriksa di Sub Bagian Pengangkatan, Kepangkatan dan Penggajian 2001, Kepala Unit Pemeriksa di Inspektorat Utama Wasinsus, Kepala Bidang di bidang Waslak

Penunjang, Kepala Bidang di Bidang I.C, Pemeriksa Utama di Auditorat VI.B, Kepala Auditorat di Auditorat VI.B, Auditor Ahli Madya di Auditorat V.B, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011.

Kepala Perwakilan (Periode Oktober 2015 s.d. September 2016)

Eldy Mustafa, S.H. (Pembina Utama Muda/IV C)



Bapak Eldy Mustafa lahir di Sungayang, 18 September 1956, memiliki seorang Istri Halimatusadyah dan tiga orang anak Nully Musdyah, Fella Eldiyah dan Lazuardo Eldy.

Riwayat Pekerjaan : Administrasi umum Tahun 1986, Pemeriksa Muda Tahun 1987, Kepala Sub Bagian Umum Tahun 1996, Kepala seksi Tahun 1997 pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Kepala Sekretariat Perwakilan Tahun 2006 pada BPK Perwakilan Provinsi Riau, Kepala Sub Auditorat Tahun 2008 pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Perwakilan pada BPK Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2012 dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.

Kepala Perwakilan (Periode Oktober 2016 s.d. Juli 2017)

Eliza, M.M., Ak., CA. (Pembina Utama Muda/IV C)



Ibu Eliza lahir di Medan, 2 Juli 1963, memiliki seorang Suami M. Endy Arifin dan dua orang anak yaitu Sanindya Lesario Arifin dan Fadila Rachmadhani

Riwayat Pekerjaan : Administrasi Umum pada Oditorat I Tahun 1991, Pemeriksa Muda pada Sub Auditorat V.A.2 Tahun 1994, Pemeriksa pada Auditorat Keuangan Negara V Tahun 1998, Kepala Sub Bidang Perencanaan Pemeriksaan BUMN pada Inspektorat Utama Renalev. Tahun 1999, Kepala Seksi BUMN Jasa Perhubungan Udara dan Darat pada Auditorat Utama Keuangan Negara V Tahun 2001, Kepala Sub Auditorat III.A.2 Tahun 2007, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi Tahun 2012 dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.

Kepala Perwakilan (Periode Agustus 2017 s.d. Juli 2019)

Pemut Aryo Wibowo S.E., M.Si., Ak. (Pembina Tk.I/IV B)



Bapak Pemut Aryo Wibowo lahir di Madiun, 3 April 1971, memiliki Istri Dharyanti dan dua orang anak yaitu Muhammad Athmar Athaya dan Agung Arif Wicaksono.

Riwayat Pekerjaan : Administrasi Umum pada AKN IV Tahun 1997, Pemeriksa Muda pada AKN IV Tahun 2004, Kepala Seksi pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2006, Kepala Sub Auditorat Kalimantan Timur II pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009, Kepala Sub Auditorat Jawa Timur IV pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2012, Kepala Auditorat IV.C Tahun 2016, dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.

Kepala Perwakilan (Periode Juli 2019 s.d. Sekarang)

Yusnadewi S.E., M.Si., AK. , CSFA (Pembina Utama Madya (IV/d))

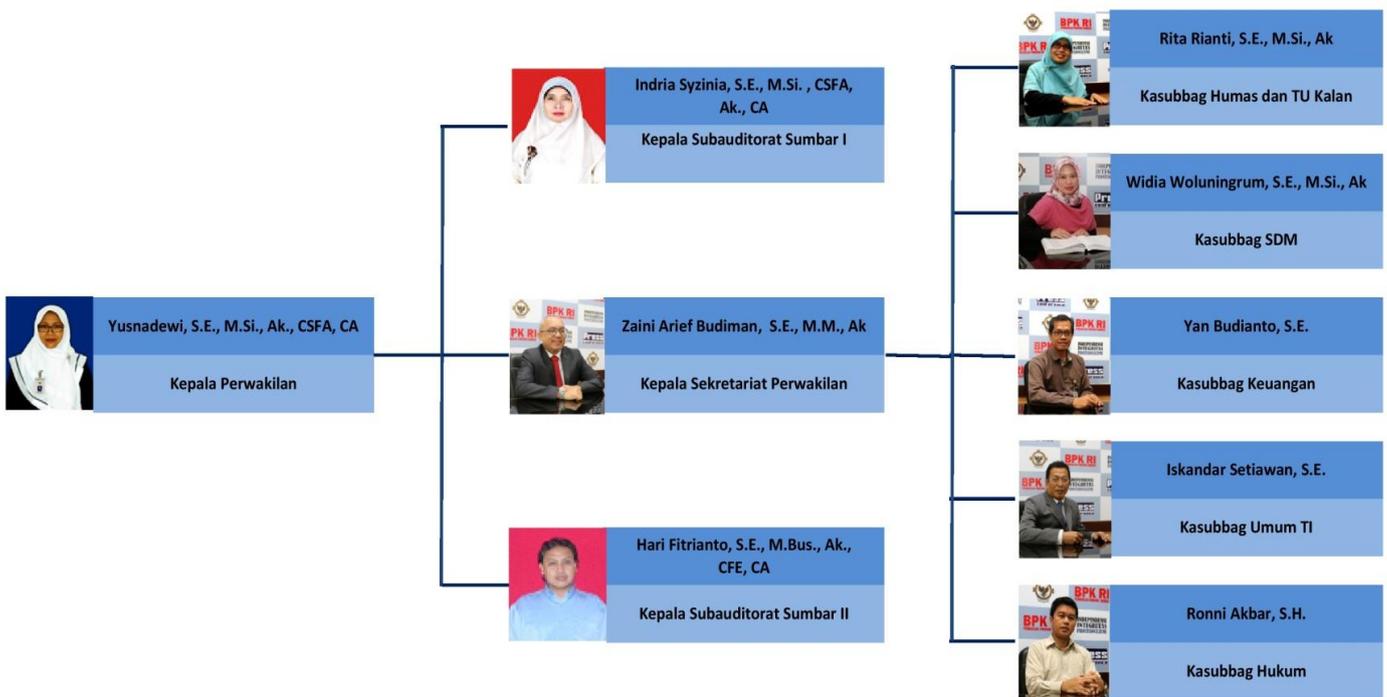


Ibu Yusnadewi lahir di Banda Aceh tanggal 2 Desember 1970 sekarang menjabat sebagai Kepala Perwakilan di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Riwayat Pekerjaan: Kepala Seksi I.A.2 Perwakilan BPK RI di Medan Tahun 2002, Kepala Seksi Sumatera Utara I Tahun 2004, Kepala Sub Auditorat Perwakilan Medan Tahun 2006, Kepala Sub Auditorat V.A Tahun 2011, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bengkulu Tahun 2014, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Banten Tahun 2016, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat Juli 2019 s.d. sekarang.

Struktur Organisasi

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat



Keluarga Besar

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat



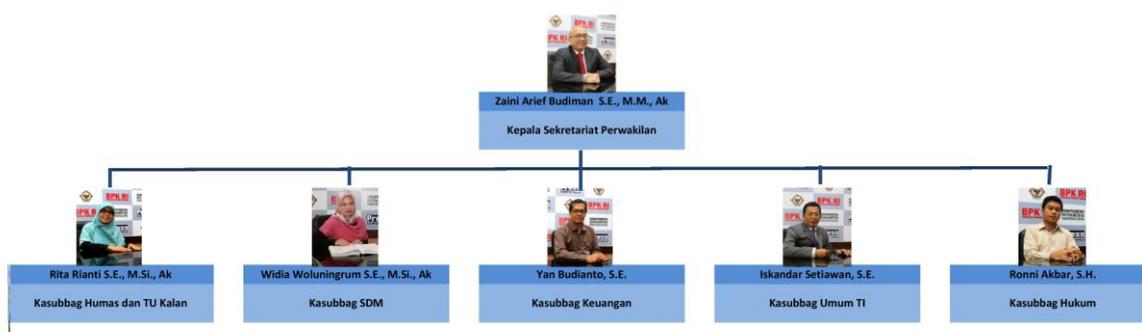
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN V.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi AKN V, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Auditor Utama Keuangan Negara V, membantu dalam Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK, Perumusan rencana kegiatan, Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah, Penyusunan program, pelaksanaan, dan Pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah, Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan, Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan, Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah, Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan, Pengevaluasian Kegiatan pemeriksaan, Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan, Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK, Penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan, Penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah, Pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum, Pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja, dan Pelaporan Hasil kegiatan secara berkala di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Sekretariat Perwakilan

Sesuai Surat Keputusan BPK RI No.3/K/I-XIII.2/7/2014 Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas penyelenggaraan dan melaksanakan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat, pengelolaan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya, keuangan, dan sarana prasarana untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.



Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan

Pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Humas dan TU Kalan meliputi kegiatan pelayanan yang bersifat internal (ke-TU-an) dan eksternal (kehumasan) termasuk pengelolaan perpustakaan dan protokoler serta publikasi, yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Sekretariat Perwakilan.



Layanan Perpustakaan

Peningkatan layanan perpustakaan dengan melakukan relokasi ruangan yang lebih strategis dan nyaman dengan ditunjang oleh Sistem Aplikasi SiPuspa yang berisi referensi yang Update dan mudah diakses.

Kehumasan

- Pusat informasi dan komunikasi dalam rangka melaksanakan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan.
- Website BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu memuat informasi yang dilaksanakan oleh pimpinan kantor, Kepala Perwakilan, dan kegiatan lain sebagai sarana komunikasi dan sharing informasi antara intern di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
- Media Relation dilakukan dalam rangka monitoring pemberitahuan BPK dengan melakukan hubungan baik pada media setempat serta menyediakan bahan tulisan (press release) saat pelaksanaan kegiatan penyerahan LHP kepada entitas.

Keprotokolan

Keprotokolan dilakukan untuk mendukung kegiatan di Kantor Perwakilan dan kegiatan pendampingan pimpinan untuk menghadiri acara yang diadakan di luar kantor.

Kesekretariatan

Kesekretariatan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan di Kantor Perwakilan dengan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta melakukan penatausahaan dan membantu kelancaran adminitrasi Kepala Perwakilan.

Subbagian Sumber Daya Manusia

Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyusun daftar kebutuhan pegawai, mutasi pegawai, memproses kenaikan pangkat, kenaikan gaji, administrasi gaji, remunerasi, taspen, bpjs, mengusulkan calon penerima penghargaan, pengelolaan sistem presensi, database SISDM, manajemen kinerja serta pengelolaan obat klinik BPK Perwakilan dsb.



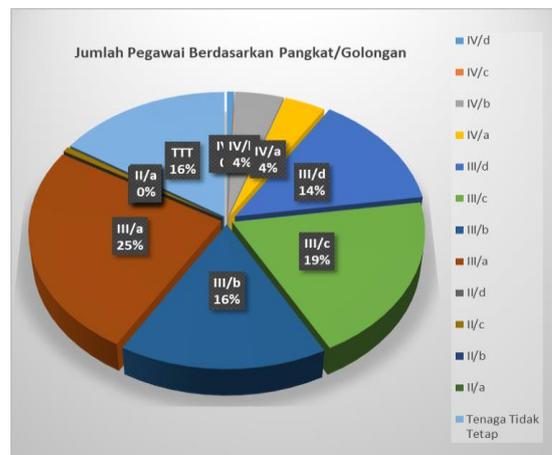
Dukungan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Bezzeting Pegawai per 31 Maret 2020 berjumlah sebanyak 134 orang yang terdiri dari:

1. Kepala Perwakilan : 1 (satu) orang
2. Kepala Sekretariat Perwakilan : 1 (satu) orang
3. Kepala Sub Auditorat : 2 (dua) orang
4. Kepala Sub Bagian : 5 (lima) orang
5. Pemeriksa : 78 (tujuh puluh delapan) orang
6. Staf Sekretariat : 31 (tiga puluh satu) orang

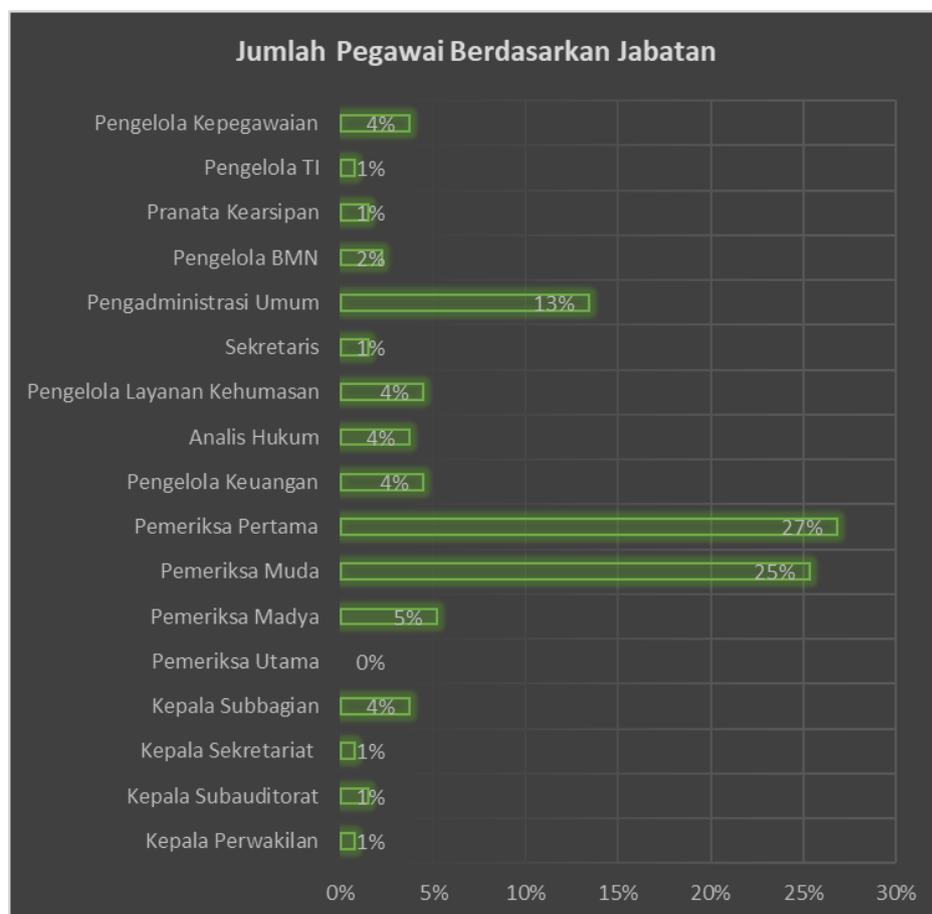
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	Persentase
1	IV/d	1	1%
2	IV/c	0	0%
3	IV/b	7	4%
4	IV/a	6	4%
5	III/d	22	14%
6	III/c	31	19%
7	III/b	26	16%
8	III/a	40	25%
9	II/d	0	0%
10	II/c	1	1%
11	II/b	0	0%
12	II/a	0	0%
13	Tenaga Tidak Tetap	25	16%
Jumlah		159	100%



Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

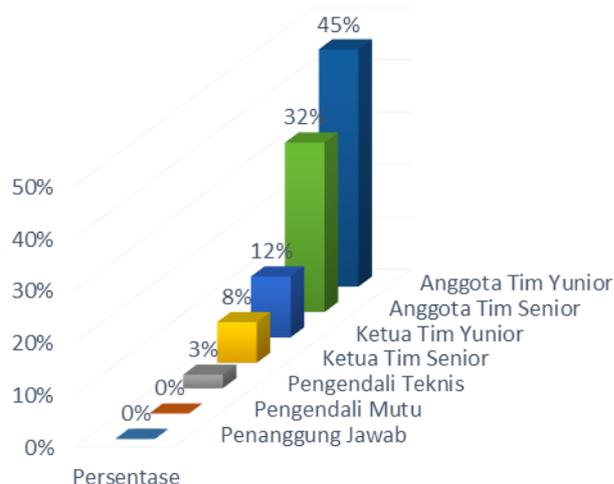
No	Jabatan	Jumlah	Persentase
1	Kepala Perwakilan	1	1%
2	Kepala Subauditorat	2	1%
3	Kepala Sekretariat	1	1%
4	Kepala Subbagian	5	4%
5	Pemeriksa Utama	0	0%
6	Pemeriksa Madya	7	5%
7	Pemeriksa Muda	34	25%
8	Pemeriksa Pertama	36	27%
9	Pengelola Keuangan	6	4%
10	Analisis Hukum	5	4%
11	Pengelola Layanan Kehumasan	6	4%
12	Sekretaris	2	1%
13	Pengadministrasi Umum	18	13%
14	Pengelola BMN	3	2%
15	Pranata Kearsipan	2	1%
16	Pengelola TI	1	1%
17	Pengelola Kepegawaian	5	4%
Jumlah		134	100%



Jumlah Pegawai Berdasarkan Peran

No	Peran	Jumlah	Persentase
1	Penanggung Jawab	0	0%
2	Pengendali Mutu	0	0%
3	Pengendali Teknis	2	3%
4	Ketua Tim Senior	6	8%
5	Ketua Tim Yunior	9	12%
6	Anggota Tim Senior	25	32%
7	Anggota Tim Yunior	35	45%
Jumlah		77	100%

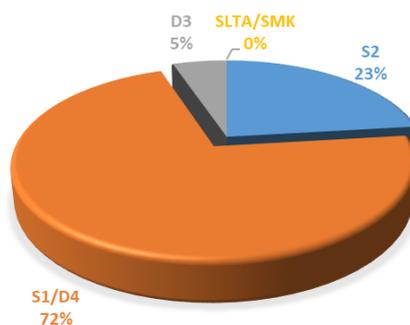
Jumlah Pegawai Berdasarkan Peran



Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	S2	31	23%
2	S1/D4	96	72%
3	D3	7	5%
4	SLTA/SMK	0	0%
Jumlah		134	100%

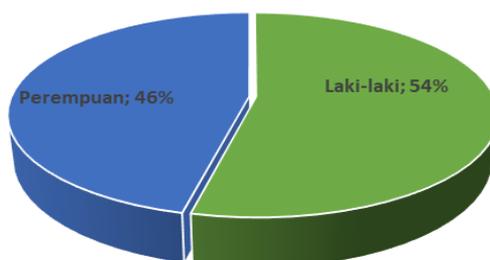
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN



Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	72	54%
2	Perempuan	62	46%
Jumlah		134	100%

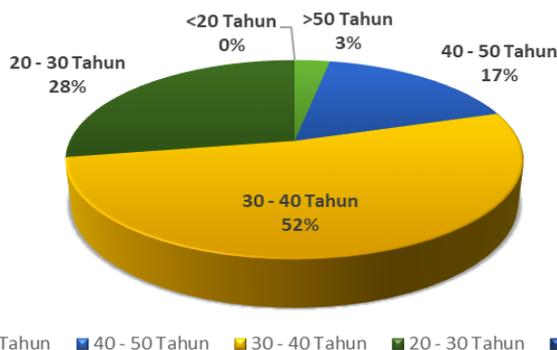
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia

No	Jenjang Usia	Jumlah	Persentase
1	>50 Tahun	4	3%
2	40 - 50 Tahun	23	17%
3	30 - 40 Tahun	70	52%
4	20 - 30 Tahun	37	28%
5	<20 Tahun	0	0%
Jumlah		134	100%

Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia



Subbagian Keuangan

Tugas Subbagian Keuangan meliputi kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan, melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Sekretariat Perwakilan serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.



Realisasi Anggaran

Untuk membiayai pelaksanaan kegiatan tahun 2019 dalam rangka memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi anggaran sebesar Rp27.011.642.000,00 bertambah menjadi Rp27.883.148.000,00. Penambahan tersebut terdiri dari penambahan belanja pegawai sebesar Rp672.545.000,00 dan penambahan anggaran pada pemeliharaan gedung dan bangunan dan peralatan dan mesin sebesar Rp198.961.000,00.

Dari alokasi anggaran tersebut. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mampu merealisasikannya sebesar Rp26.849.830.015,00 atau sebesar 96,29%. Berikut adalah anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2019:

Strategi	Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (IKU)		Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	4.266.037.000	4.044.628.000
	IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Tindak Pidana ke IPH		
	IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli		
	IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang		

Strategi	Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (IKU)		Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
	(1)	(2)		
Strategi 1.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	6.204.194.000	5.950.567.000
	IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP		
	IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP		
Strategi 1.2. Meningkatnya Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	2.127.652.000	2.048.636.000
	IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara		
	IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang		
Strategi 2.1 Meningkatnya Kualitas Hasil Pemeriksaan	IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	6.279.095.000	6.056.509.000
	IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK		
	IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP		
	IK 2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK		
Strategi 3.1 Terciptanya Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK	2.619.886.000	2.543.940.000
	IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK		
	IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin		
Strategi 3.2 Meningkatnya Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	4.861.102.000	4.722.368.000
	IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi		
	IK 3.2.3	Jumlah <i>Best-Practice</i> yang Disusun		
	IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>		
	IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja		
	IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana		
	IK 3.2.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan		

Strategi	Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (IKU)		Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
	(1)	(2)	(3)	(4)
Strategi 3.3 Meningkatnya Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	1.313.617.000	1.274.254.000
	IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)		
Strategi 3.4 Meningkatnya Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	211.565.000	208.928.015
			27.883.148.000	26.849.830.015

Subbagian Umum dan Teknologi Informasi

Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas memberikan layanan administrasi umum, pengelolaan arsip, memproses pengadaan barang jasa, mengadministrasikan dan memelihara Barang Milik Negara serta hal-hal yang berkaitan dengan layanan umum lainnya.



Barang Milik Negara

131111 Tanah

KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI
2.01.01	Tanah Persil	9.264	17.292.210.000

132111 Peralatan dan Mesin

KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI
3.01.03	Alat Bantu	7	2.539.950.000
3.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	12	1.114.636.000
3.03.01	Alat Bengkel Bermesin	2	149.638.500

132111 Peralatan dan Mesin

KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI
3.03.03	Alat Ukur	8	89.318.000
3.05.01	Alat Kantor	396	3.855.605.846
3.05.02	Alat Rumah Tangga	1.229	6.219.790.227
3.06.01	Alat Studio	73	541.862.881
3.06.02	Alat Komunikasi	75	343.915.844
3.06.03	Peralatan Pemancar	2	267.929.991
3.07.01	Alat Kedokteran	15	28.350.000
3.08.01	Unit Alat Laboratorium	20	1.555.381.865
3.10.01	Komputer Unit	102	1.638.844.051
3.10.02	Peralatan Komputer	223	3.617.295.146
3.17.01	Unit Peralatan Proses/Produksi	4	119.527.292

133111 Gedung dan Bangunan

KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI
4.01.01	Bangunan Gedung Tanpa Kerja	10	28.085.989.542
4.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	10	6.882.890.069
4.04.01	Tugu/Tanda Batas	3	1.497.313.245

134112 Irigasi

KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI
5.02.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Tanah	2	397.383.360
5.02.07	Bangunan Air Kotor	1	12.083.830

134113 Jaringan

KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI
5.03.01	Instalasi Air Bersih / Air Baku	1	274.225.768
5.03.02	Instalasi Air Kotor	1	12.083.830
5.03.06	Instalasi Gardu Listrik	2	3.137.933.485
5.03.09	Instalasi Pengaman	1	15.432.833
5.03.10	Instansi Lain	4	677.221.634
5.04.02	Jaringan Listrik	1	106.315.825
5.04.03	jaringan telepon	1	184.607.781

135121 Aset Tetap Lainnya

KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI
6.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	1.727	116.563.770
6.02.01	Barang Bercorak Kesenian	4	33.924.000

162151 Software

KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI
8.01.01	Aset Tak Berwujud	5	359.939.500

162161 Lisensi

KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI
8.01.01	Aset Tak Berwujud	12	123.316.908

Subbagian Hukum

Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan legislasi atas produk hukum, mereviu tulisan hukum, mengelola Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, memberikan konsultasi atau pendapat hukum, memantau penanganan hasil pemeriksaan BPK yang diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum, mereviu proses penyelesaian laporan hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian daerah, mereviu pemberian bantuan hukum kepada pegawai yang diminta memberi keterangan ahli dan sebagainya.



Legislasi

Kegiatan layanan legislasi yaitu berupa pemberian layanan dalam penyusunan produk hukum pada BPK Perwakilan. Produk hukum tersebut meliputi Keputusan, Instruksi Dinas, Surat Edaran, dan lain – lain yang menjadi kewenangan BPK Perwakilan. Tahapan layanan legislasi mulai dari penyampaian usulan oleh unit kerja pengusul sampai penetapan produk hukum. Dalam Semester I Tahun 2017, telah diproses sebanyak 30 Keputusan dan 7 Instruksi Dinas Kepala Perwakilan.

Konsultasi Hukum

Kegiatan konsultasi hukum sering disebut juga dengan kegiatan telaahan hukum yang dilakukan dalam hal terdapat permintaan konsultasi, telaahan atau pendapat hukum atas temuan pemeriksaan atau hal – hal yang terkait dengan pelaksanaan dalam kegiatan ini yaitu berupa diskusi atau konsultasi yang dilakukan bersama – sama dengan melibatkan pegawai pada Subbagian Hukum.

Bantuan Hukum

Pemberian layanan bantuan hukum dilakukan dalam hal yang terdapat permintaan bantuan, hukum dari unit kerja terkait untuk pejabat/ pemeriksa / pegawai BPK Perwakilan. Bantuan hukum dapat dilakukan dengan memberikan masukan/ diskusin dari aspek hukum dalam suatu

persoalan dan pendampingan hukum dalam proses pemberian keterangan ahli baik dalam proses penyidikan dan proses siding pengadilan.

Informasi Hukum

Kegiatan informasi hukum dilakukan dengan cara memberikan peraturan perundang – undangan atau produk hukum internal BPK yang diminta oleh pegawai BPK. Kegiatan informasi hukum ini termasuk pula melakukan koordinasi atau kerja sama dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Bengkulu. Hasil kerja sama dengan JDIH Provinsi/Kabupaten/ Kota yaitu berupa diperolehnya produk hukum Pemerintah Daerah yang selanjutnya akan di unggah di situs <http://padang.bpk.go.id>, khususnya dalam bagian UJDIH.

Subauditorat Sumbar I

Subauditorat Sumbar I mempunyai tugas mereviu RKP dan LHP yang dilaksanakan, mereviu konsep hasil pementauan penyelesaian kerugian daerah, memantau kegiatan pemeriksaan, mengompilasi dan mereviu bahan evaluasi Sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan, melakukan pembahasan, memantau dan mengompilasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, menyusun perumusan bahan pendapat, memutakhirkan data manajemen dan profil pemeriksaan, menyiapkan bahan penyusunan LAK dan melaksanakan pemeriksaan pada 10 entitas yaitu:

- | | | | |
|---|----------------------|----|-----------------|
| 1 | Provinsi Sumbar | 6 | Kab. Sijunjung |
| 2 | Kab. Pesisir Selatan | 7 | Kab. Solok |
| 3 | Kab. Dharmasraya | 8 | Kota Pariaman |
| 4 | Kab. Kep. Mentawai | 9 | Kota Solok |
| 5 | Kab. Solok Selatan | 10 | Kota Sawahlunto |



Subauditorat Sumbar II

Subauditorat Sumbar II mempunyai tugas mereviu RKP dan LHP yang dilaksanakan, mereviu konsep hasil pementauan penyelesaian kerugian daerah, memantau kegiatan pemeriksaan, mengompilasi dan mereviu bahan evaluasi Sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan, melakukan pembahasan, memantau dan mengompilasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, menyusun perumusan bahan pendapat, memutakhirkan data manajemen dan profil pemeriksaan, menyiapkan bahan penyusunan LAK dan melaksanakan pemeriksaan pada 10 entitas yaitu:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1 Kab. Pasaman | 6 Kab. Padang Pariaman |
| 2 Kab. Pasaman Barat | 7 Kota Padang Panjang |
| 3 Kab.Lima Puluh Kota | 8 Kota Bukittinggi |
| 4 Kab. Agam | 9 Kota Padang |
| 5 Kab. Tanah Datar | 10 Kota Payakumbuh |



Informasi

Pemeriksaan

Informasi Pemeriksaan

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan keuangan negara. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Jenis-jenis Pemeriksaan

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara, BPK mempunyai kewenangan untuk melakukan tiga jenis pemeriksaan:

Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan yang berlaku. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan mendasarkan pada:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan dan atau prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan
2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*)
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
4. Efektitas sistem pengendalian intern

Kegiatan pemeriksaan Laporan Keuangan yang ada dalam RKP BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan telah dilaksanakan pada Semester I Tahun 2019 yaitu Pemeriksaan Pendahuluan dan Terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2018 pada dua puluh entitas:

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. Provinsi Sumatera Barat | 11. Kota Pariaman |
| 2. Kabupaten Dharmasraya | 12. Kabupaten Tanah Datar |
| 3. Kabupaten Lima Puluh Kota | 13. Kabupaten Padang Pariaman |
| 4. Kabupaten Solok Selatan | 14. Kota Sawahlunto |
| 5. Kabupaten Pasaman Barat | 15. Kota Payakumbuh |
| 6. Kabupaten Pasaman | 16. Kabupaten Pesisir Selatan |
| 7. Kota Bukittinggi | 17. Kota Solok |
| 8. Kota Padang Panjang | 18. Kabupaten Solok |
| 9. Kabupaten Agam | 19. Kabupaten Sijunjung |
| 10. Kota Padang | 20. Kabupaten Kepulauan Mentawai |

Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan kinerja merupakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang bertujuan untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektifitas. Pengujian atas kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dan pengendalian intern juga dilakukan dalam pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan kinerja menghasilkan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja suatu program/kegiatan/entitas dan memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak yang bertanggungjawab untuk mengawasi manajemen dan mengambil tindakan koreksi, serta meningkatkan akuntabilitas publik.

Kegiatan pemeriksaan kinerja yang ada dalam RKP BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan telah dilaksanakan pada Semester II Tahun 2019 sebanyak 8 (delapan), sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia TA 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta Instansi Terkait Lainnya;
2. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia TA 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
3. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia TA 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;
4. Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan pada Pemerintah Kota Padang TA 2018 s.d. 2019 (Semester I);
5. Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan pada Pemerintah Kota Bukittinggi TA 2018 s.d. 2019 (Semester I);
6. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar serta Instansi Terkait Lainnya;
7. Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, dan 2018/2019 pada Pemerintah Kota Payakumbuh; dan
8. Pemeriksaan Kinerja Tematik atas penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada KPUD Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam dan Kabupaten Padang Pariaman.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

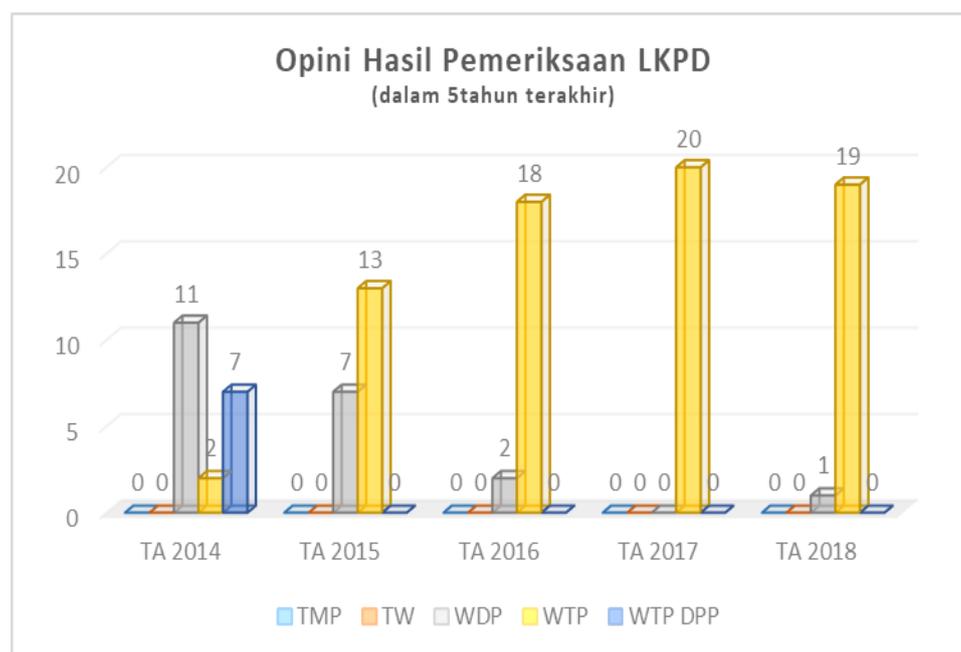
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. PDTT tidak memberikan opini ataupun untuk memberikan penilaian kinerja dan memberikan rekomendasi. PDTT bisa bersifat eksaminasi (pengujian), revidu, atau prosedur yang disepakati. Sebagian besar PDTT yang dilaksanakan BPK bersifat eksaminasi yaitu pemeriksa menyatakan simpulan dengan tingkat keyakinan positif bahwa suatu pokok masalah telah sesuai atau telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan kriteria.

Kegiatan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang ada dalam RKP BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan telah dilaksanakan pada Semester II Tahun 2019 sebanyak empat, sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa daerah Tahun Anggaran (TA) 2018 dan 2019 pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa daerah Tahun Anggaran (TA) 2018 dan 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sijunjung di Muaro Sijunjung;
3. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa daerah Tahun Anggaran (TA) 2018 dan 2019 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Padang, beserta instansi terkait lainnya; dan
4. Pemeriksaan atas Operasional PT Bank Pembangunan Daerah (Bank Nagari) Tahun Buku 2017 s.d. Semester I 2019.

Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan laporan keuangan menghasilkan opini atas laporan keuangan yang disajikan oleh entitas yang diperiksa. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa BPK atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah. Dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan, selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga melaporkan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern, dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa sebagai hasil pemeriksaan keuangan meliputi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTPDPP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Hasil pemeriksaan atas LKPD yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat selama lima tahun terakhir dapat digambarkan dengan grafik sebagai berikut:



Hasil pemeriksaan atas LKPD yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat selama lima tahun terakhir per entitas adalah sebagai berikut:

No	Entitas	Opini Pemeriksaan LKPD				
		TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018
1	Provinsi Sumatera Barat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kabupaten Tanah Datar	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Kota Padang	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Pesisir Selatan	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Kota Bukittinggi	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Kabupaten Pasaman Barat	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
7	Kabupaten Agam	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
8	Kota Payakumbuh	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	Kota Sawahlunto	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Kabupaten Solok	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
11	Kota Padang Panjang	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
12	Kabupaten Pasaman	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
13	Kabupaten Dharmasraya	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Kota Pariaman	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
15	Kabupaten Sijunjung	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
16	Kota Solok	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
17	Kabupaten Padang Pariaman	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WDP
18	Kabupaten Lima Puluh Kota	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
19	Kabupaten Solok Selatan	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
20	Kabupaten Kepulauan Mentawai	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Tindak lanjut telah diatur dalam Peraturan BPK No.2 tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan (auditee) yang berwenang untuk dilakukan tindakan perbaikan. Penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan pengelolaan keuangan negara. Hal ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan auditee atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Pada Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan dua kali pemantauan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan atas 20 entitas pada Semester I tanggal 25 s.d. 28 Juni 2019 dan Semester II tanggal 9 s.d. 10 Desember 2019.

Berdasarkan rekapitulasi data dari aplikasi SMP per tanggal 17 Februari 2020, nilai Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan adalah sebesar 75,92% dengan rincian 14.207 rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti, 3.507 rekomendasi belum selesai/masih dalam proses ditindaklanjuti, 1.001 rekomendasi belum ditindaklanjuti, dan 9 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah, sebagai berikut:

No.	Entitas	Temuan		Rekomendasi		Status Tindak Lanjut Rekomendasi							
						Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah	
		Jml.	Nilai (Rp)	Jml.	Nilai (Rp)	Jml.	Nilai (Rp)	Jml.	Nilai (Rp)	Jml.	Nilai (Rp)	Jml.	Nilai (Rp)
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan s.d. Semester II Tahun 2019													
1	Provinsi Sumatera Barat	759	175.671.409.821,74	1.835	111.846.743.477,47	1.452	43.980.433.147,24	240	58.220.629.791,70	141	9.645.680.538,53	2	0,00
2	Kabupaten Agam	326	168.472.292.263,93	815	13.689.296.563,02	654	9.944.032.632,17	155	3.130.842.930,85	3	0,00	3	614.421.000,00
3	Kabupaten Dharmasraya	353	54.948.251.406,54	902	33.985.447.185,03	696	21.248.010.479,12	180	12.706.638.409,21	26	22.458.296,70	-	8.340.000,00
4	Kabupaten Kep. Mentawai	318	97.849.353.398,84	772	40.878.713.681,23	558	14.441.493.084,45	147	18.584.535.475,78	67	7.852.685.121,00	-	0,00
5	Kabupaten Lima Puluh Kota	266	37.699.704.147,23	670	6.219.613.661,72	422	1.615.396.556,05	135	856.551.006,79	113	3.747.666.098,88	-	0,00
6	Kabupaten Padang Pariaman	331	57.036.292.025,72	838	17.932.517.886,08	543	5.642.599.104,01	208	8.825.312.236,37	87	3.464.606.545,70	-	0,00
7	Kabupaten Pasaman	305	27.504.708.724,76	758	21.950.849.135,07	540	5.750.941.499,38	203	13.998.944.537,61	15	2.200.963.098,08	-	0,00
8	Kabupaten Pasaman Barat	277	40.580.781.136,59	725	27.228.801.769,14	435	8.954.794.291,46	189	17.614.415.633,14	101	659.591.844,54	-	0,00
9	Kabupaten Pesisir Selatan	366	30.527.384.740,30	916	22.666.687.095,22	739	14.958.986.028,26	165	7.707.701.066,96	12	0,00	-	0,00
10	Kabupaten Sijunjung	364	26.135.623.581,37	892	20.079.932.190,13	616	8.201.459.972,15	199	1.960.431.101,24	77	9.918.041.116,74	-	0,00
			USD 924.183,65		USD 924.183,65		USD 0,00		USD 924.183,65		USD 0,00		USD 0,00
11	Kabupaten Solok	315	24.498.577.513,83	814	16.350.335.945,69	590	4.991.451.920,02	195	11.309.071.725,67	29	49.812.300,00	-	0,00
12	Kabupaten Solok Selatan	368	75.137.190.937,15	1.007	57.282.556.893,59	736	18.105.105.486,41	233	37.915.892.921,63	38	1.261.558.485,55	-	0,00
13	Kabupaten Tanah Datar	339	46.348.821.401,39	866	5.142.081.860,48	676	2.042.819.715,73	133	2.930.919.972,02	57	168.342.172,73	-	0,00
14	Kota Bukittinggi	342	30.814.632.028,38	837	4.645.253.139,58	655	2.019.522.980,08	152	2.625.730.159,50	30	0,00	-	0,00
15	Kota Padang	453	94.573.575.309,66	1.347	24.529.192.183,55	1.092	17.866.652.009,00	204	6.185.065.188,55	50	477.474.986,00	1	0,00
			USD 77,18		USD 77.178,00		USD 0,00		USD 77.178,00		USD 0,00		USD 0,00
16	Kota Padang Panjang	267	19.513.678.779,53	765	9.426.172.810,86	604	6.931.669.269,86	149	2.372.423.541,00	12	122.080.000,00	-	0,00
17	Kota Pariaman	320	50.897.749.339,75	759	17.906.889.788,54	559	8.553.668.491,91	157	9.190.653.246,63	43	162.568.050,00	-	0,00
18	Kota Payakumbuh	337	58.674.241.580,99	858	15.362.063.853,48	738	9.635.777.464,69	99	5.726.286.388,79	21	0,00	-	0,00
19	Kota Sawahlunto	380	88.090.419.553,13	944	67.167.931.987,35	726	37.577.996.833,56	184	29.331.389.713,78	33	258.545.440,01	1	0,00
20	Kota Solok	314	29.356.731.460,71	760	18.080.501.940,59	644	13.626.563.988,78	114	2.836.765.744,81	-	0,00	2	1.617.172.207,00
21	PDAM (Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh)	199	60.469.887.702,02	462	21.668.364.037,92	414	11.639.243.230,47	44	10.029.120.807,45	4	0,00	-	0,00
22	PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	76	23.547.727.476,23	182	19.300.644.775,70	118	18.475.734.801,16	22	774.344.724,54	42	50.565.250,00	-	0,00
	JUMLAH	7.375	1.318.349.958.591	18.724	593.341.593.223	14.207	286.204.352.986	3.507	264.834.667.686	1.001	40.062.639.344	9	2.239.933.207

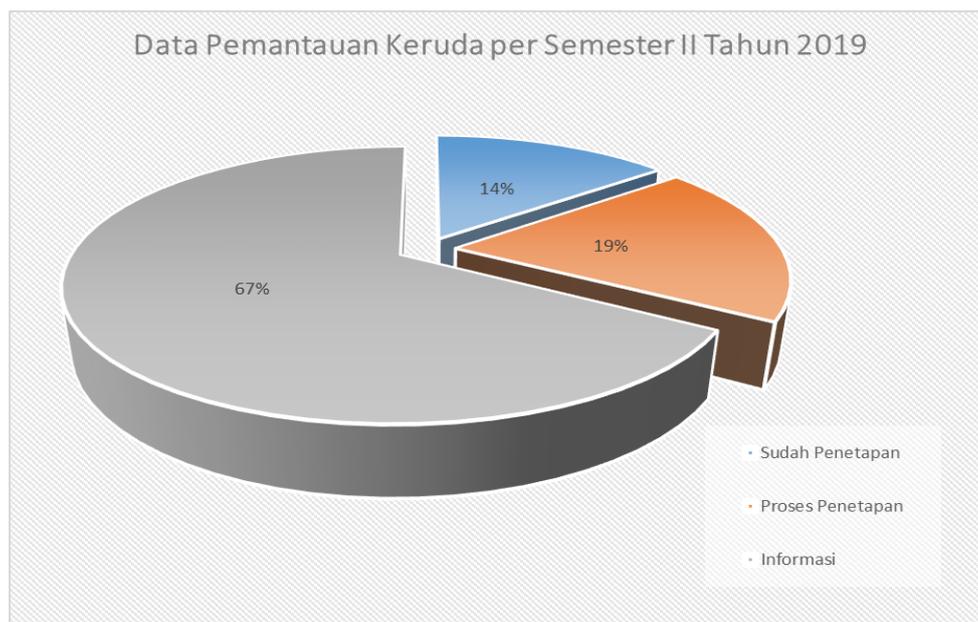
Pemantauan Kerugian Negara/Daerah

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat melakukan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah agar penyelesaian ganti kerugian negara/daerah baik dari sisi jangka waktu penyelesaian maupun besaran ganti rugi terlaksana secara efektif. Kasus kerugian negara/daerah yang dimaksud terdiri dari kasus kerugian negara/daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bendaharawan, PNS nonbendaharawan dan pihak ketiga.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat melakukan pemantauan atas kerugian negara/daerah yang berasal dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan baik oleh BPK maupun Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) pada 20 entitas. Berdasarkan hasil rekapitulasi, sampai dengan semester II tahun 2019, nilai total kerugian daerah adalah sebesar Rp327.546.403.000,10 dan telah lunas pembayarannya sebesar Rp132.499.225.710,06, dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (Rp)	Sudah Penetapan (Rp)	Proses Penetapan (Rp)	Informasi (Rp)	Pembayaran (Rp)	Sisa (Rp)
1	Kabupaten Padang Pariaman	9.835.351.752,75	12.135.000,00	-	9.823.216.752,75	4.444.230.741,33	5.391.121.011,42
2	Kabupaten Pasaman Barat	26.926.160.340,98	515.055.750,00	366.666.292,00	26.044.438.298,98	9.712.253.357,23	17.213.906.983,75
3	Kabupaten Lima Puluh Kota	10.857.715.869,00	293.603.000,00	1.805.533.333,00	8.758.579.536,00	8.349.078.390,27	2.508.637.478,73
4	Kota Bukittinggi	8.394.086.071,04	404.209.457,39	454.658.951,98	7.535.217.661,67	6.174.340.659,30	2.219.745.411,74
5	Kabupaten Agam	5.082.644.814,63	593.106.712,34	1.169.393.091,66	3.320.145.010,63	3.547.119.197,96	1.535.525.616,67
6	Kota Padang	17.363.856.090,47	1.394.340.547,68	426.908.663,00	15.542.606.879,79	10.694.278.785,41	6.669.577.305,06
7	Kota Payakumbuh	4.365.783.272,93	61.572.231,00	978.165.777,00	3.326.045.264,93	2.473.788.539,74	1.891.994.733,19
8	Kota Padang Panjang	8.013.010.058,46	62.467.345,00	150.658.390,00	7.799.884.323,46	5.367.524.507,62	2.645.485.550,84
9	Kabupaten Tanah Datar	4.148.507.531,33	284.029.916,00	251.483.150,00	3.612.994.465,33	2.852.765.811,58	1.295.741.719,75
10	Kabupaten Pasaman	18.284.931.179,88	-	1.323.509.992,36	16.961.421.187,52	4.658.295.733,53	13.626.635.446,35
11	Provinsi Sumbar	69.687.506.429,61	9.914.775.905,08	44.946.875.053,60	14.825.855.470,93	17.463.533.556,50	52.223.972.873,11
12	Kabupaten Kepulauan Mentawai	15.607.128.904,24	1.411.475.397,00	21.585.500,00	14.174.068.007,24	4.384.412.619,41	11.222.716.284,83
13	Kota Sawahlunto	13.686.746.503,57	3.385.951.248,40	396.152.809,00	9.904.642.446,17	12.095.807.931,30	1.590.938.572,27
14	Kota Pariaman	9.526.258.348,62	-	675.604.332,00	8.850.654.016,62	5.187.541.978,02	4.338.716.370,60
15	Kabupaten Solsel	53.557.788.985,52	22.811.568.985,00	499.283.948,00	30.246.936.052,52	6.573.105.911,65	46.984.683.073,87
16	Kabupaten Solok	11.943.444.949,58	457.977.100,00	377.764.144,75	11.107.703.704,83	4.706.839.225,36	7.236.605.724,22
17	Kota Solok	7.436.986.590,94	1.944.669.355,11	1.444.596.318,50	4.047.720.917,33	4.790.367.896,21	2.646.618.694,73
18	Kabupaten Dharmasraya	12.478.760.839,17	2.411.635.920,56	845.666.002,54	9.221.458.916,07	6.171.519.383,48	6.307.241.455,69
19	Kabupaten Sijunjung	9.894.773.372,98	519.357.607,59	2.894.199.690,00	6.481.216.075,39	6.054.654.022,00	3.840.119.350,98
20	Kabupaten Pesisir Selatan	10.454.961.094,40	313.324.413,00	3.858.136.133,54	6.283.500.547,86	6.797.767.462,16	3.657.193.632,24
	Jumlah	327.546.403.000,10	46.791.255.891,15	62.886.841.572,93	217.868.305.536,02	132.499.225.710,06	195.047.177.290,04

Berikut diagram lingkaran yang dapat menggambarkan Data Pemantauan Keruda per Semester II Tahun 2019 di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat:



Entitas

Pemeriksaan

Provinsi Sumatera Barat



Dasar Pembentukan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958

Ibukota

Kota Padang

Alamat Kantor Gubernur

Jl. Jenderal Sudirman, No.15, Jati Baru,
Padang Timur, Padang Pasir, Padang Bar.,
Kota Padang, Sumatera Barat 25129

Alamat Kantor DPRD

Jl. S. Parman No.221, Ulak Karang Utara,
Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat

Luas Wilayah

42.297,30 km²

Jumlah Penduduk (2010)

4.846.909 jiwa

Jumlah Wilayah Administrasi

12 Kabupaten dan 7 Kota dengan 147
Kecamatan dan 877 Kelurahan
41 SKPD dan 7 BUMD

Batas Wilayah

Utara : provinsi sumatera utara
Selatan : provinsi jambi
Barat : samudera hindia
Timur : provinsi riau

Website

www.sumbarprov.go.id

Pimpinan Dewan

Ketua DPRD : Supardi
Wakil Ketua I : H. Ir. Irsyad Syafar, Lc., M.Ed.
Wakil Ketua II : H. Indra Datuak Rajo Lelo, SH., MM.
Wakil Ketua III : H. Suwirpen Suib, S.Sos.

Pimpinan Daerah

Kepala Daerah : Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, S.Psi., M.Sc.
Wakil Kepala Daerah : Drs. H. Nasrul Abit
Sekretaris Daerah : Drs. Alwis
Inspektur : Drs. H. Mardi, M.M.

Neraca Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2018

Tahun	Aset (Rp)	Kewajiban (Rp)	Ekuitas (Rp)
2018	10.618.211.428.227,00	293.281.944.852,30	10.324.929.483.374,70
2017	10.746.879.602.265,00	224.544.601.805,67	10.522.335.000.459,30
2016	8.152.807.500.452,42	183.339.616.278,28	7.969.467.884.174,14
2015	7.168.026.165.849,71	173.654.547.551,94	6.994.371.618.297,77
2014	9.684.014.728.536,24	159.530.637.486,80	9.524.484.091.049,44

Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat TA 2014-2018

Tahun	Anggaran		Realisasi	
	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)
2018	6.464.256.196.560,00	5.883.475.884.676,77	6.292.287.631.025,90	5.462.759.063.270,09
2017	6.132.481.349.250,00	5.499.761.868.931,98	6.066.826.853.956,41	4.912.514.633.429,62
2016	4.630.406.536.915,00	4.806.903.528.388,86	4.624.674.545.939,55	4.504.037.258.760,43
2015	4.036.155.306.941,00	4.232.659.950.677,00	4.052.249.308.119,38	4.022.256.960.382,22
2014	3.522.329.927.000,00	3.009.281.567.816,94	3.635.837.760.819,71	2.842.088.440.186,95

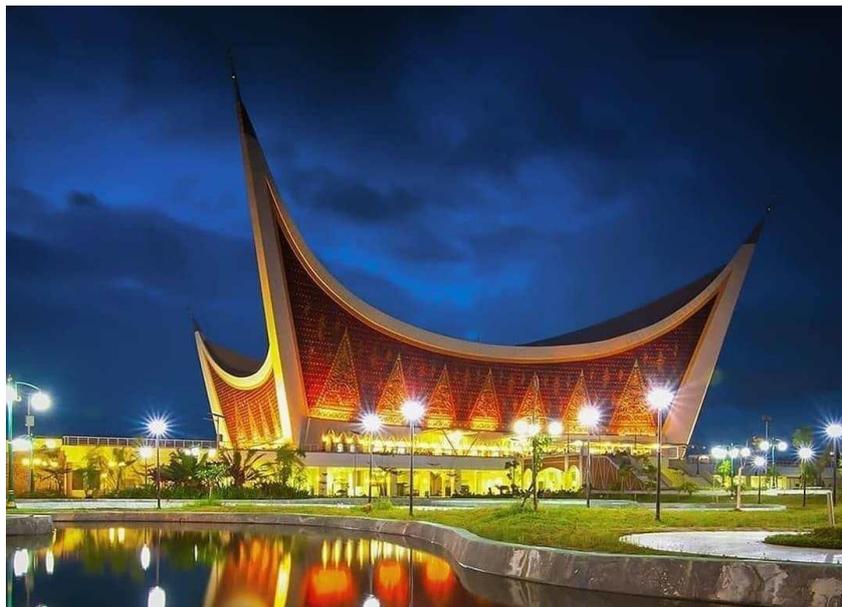
Sumatera Barat adalah rumah bagi etnis Minangkabau, walaupun wilayah adat Minangkabau sendiri lebih luas dari wilayah administratif Provinsi Sumatera Barat saat ini.

Sumatera Barat merupakan salah satu tujuan utama pariwisata di Indonesia. Fasilitas wisatanya yang cukup baik, serta sering diadakannya berbagai festival dan even internasional, menjadi pendorong datangnya wisatawan ke provinsi ini. Beberapa kegiatan internasional yang diselenggarakan untuk menunjang pariwisata Sumatera Barat adalah lomba balap sepeda Tour de Singkarak, even paralyang Event Fly for Fun in Lake Maninjau, serta kejuaraan selancar Mentawai International Pro Surf Competition.

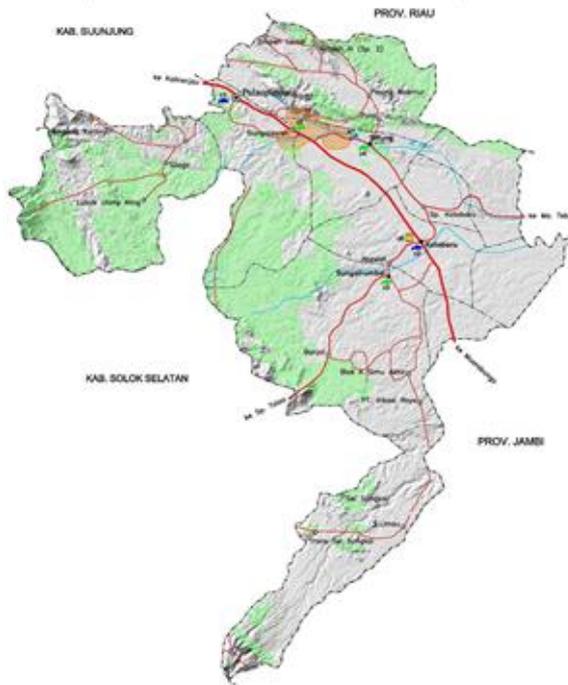
Sumatera Barat memiliki hampir semua jenis objek wisata alam seperti laut, pantai, danau, gunung, dan ngarai. Selain itu pariwisata Sumatera Barat juga banyak menjual budayanya yang khas, seperti Festival Tabuik, Festival Rendang, permainan kim, dan seni bertenun. Disamping wisata alam dan budaya, Sumatera Barat juga terkenal dengan wisata kulinernya.

Untuk berbagai informasi serta literatur sejarah dan kebudayaan Minangkabau, wisatawan dapat memperolehnya di Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM) yang terletak di Perkampungan Minangkabau, Padang Panjang. Di PDIKM terdapat berbagai dokumentasi berupa foto mikrograf, surat kabar, pakaian tradisional, kaset rekaman lagu daerah, dokumentasi surat-surat kepemerintahan, dan alur sejarah masyarakat Minangkabau sejak abad ke-18 hingga tahun 1980-an.

Rumah adat Sumatera Barat khususnya dari etnis Minangkabau disebut Rumah Gadang. Rumah Gadang biasanya dibangun di atas sebidang tanah milik keluarga induk dalam suku/kaum tersebut secara turun temurun. Tidak jauh dari komplek rumah gadang tersebut biasanya juga dibangun sebuah surau kaum yang berfungsi sebagai tempat ibadah dan tempat tinggal lelaki dewasa kaum tersebut namun belum menikah.



Kabupaten Dharmasraya



Dasar Pembentukan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003

Ibukota

Pulau Punjung

Alamat Kantor Bupati

Jalan Lintas Sumatera pulau punjung

Alamat Kantor DPRD

Gn. Medan, Sitiung, Dharmasraya, Gn.
Medan, Sitiung, Kabupaten Dharmasraya,
Sumatera Barat 27678

Luas Wilayah

296.113 ha

Jumlah Penduduk (2010)

191.422 jiwa

Jumlah Wilayah Administrasi

11 Kecamatan, 52 Nagari
39 SKPD dan 1 BUMD.

Batas Wilayah

- Utara : Kab. Swl/Sijunjung & Kab.
Kuantan Singingi – Riau
- Selatan : Kab. Bungo & Kerinci
Propinsi Jambi
- Barat : Kab. Solok & Kab. Solok
Selatan
- Timur : Kab. Bungo & Tebo Prov.
Jambi

Website

www.dhamasrayakab.go.id

Pimpinan Dewan

Ketua DPRD : Pariyanto, S.H.
Wakil Ketua I : I r . H . Adi Gunawan, M.M.
Wakil Ketua II : H . Benny Ridwan

Pimpinan Daerah

Kepala Daerah : Sutan Riska Tuanku Kerajaan, S.E.
Wakil Kepala Daerah : H. Amrizal Dt. Rajo Medan, S.Sos
Sekretaris Daerah : H. Adlisman, S.Sos.,M.Si
Inspektur : Kandan, S.Sos

Neraca Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014-2018

Tahun	Aset (Rp)	Kewajiban (Rp)	Ekuitas (Rp)
2018	2.429.453.615.523,15	20.532.747.157,88	2.408.920.868.365,27
2017	2.239.704.586.406,88	28.155.677.075,10	2.211.548.909.331,78
2016	2.119.569.745.404,46	17.745.097.191,33	2.101.824.648.213,13
2015	1.867.848.423.388,94	40.997.130.880,72	1.826.851.292.508,22
2014	1.463.957.910.211,65	22.156.020.315,00	1.441.801.889.896,65

Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Dharmasraya TA 2014-2018

Tahun	Anggaran		Realisasi	
	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)
2018	933.007.066.327,00	858.958.760.196,00	923.540.952.021,88	826.104.720.715,14
2017	976.912.734.168,00	893.767.544.754,00	949.023.480.858,55	834.307.938.503,00
2016	955.018.041.345,00	903.206.731.310,23	875.195.933.215,60	804.052.988.144,92
2015	811.684.636.980,00	798.464.612.321,00	794.425.975.047,00	752.811.152.229,00
2014	709.415.189.737,00	709.042.912.885,00	687.279.316.499,12	652.470.659.806,00

Potensi wilayah Kabupaten Dharmasraya antara lain bidang perkebunan, pertanian, peternakan, pertambangan, dan pariwisata. Kabupaten Dharmasraya berkembang sebagai salah satu penghasil kelapa sawit atau buah pasir menurut istilah setempat. Di samping itu, kabupaten ini juga merupakan produsen berbagai jenis tanaman keras lainnya, seperti kulit manis, karet, kelapa, gambir, kopi, coklat, cengkih, dan pinang. Lahan perkebunan di sana lebih didominasi karet dan sawit. Selain itu terdapat potensi tambang yang hingga detik ini belum tergarap, yakni batu bara, batu kapur, pasir kuarsa, emas, lempung kuarsit, dan sebagainya.

Kabupaten ini masih baru dan masih dalam tahap mengembangkan diri dengan membuka peluang investasi seluas-luasnya. Ditunjang dengan posisi strategisnya di Sumatera (dilintasi Jalur Lintas Tengah Sumatera sepanjang 100 km), maka Dharmasraya cepat menjadi kawasan yang maju dan tumbuh sebagai wilayah perdagangan dan jasa. Pada Tahun 2014 sampai 2015, batu cincin sedang digemari oleh masyarakat, batu cincin dari Kabupaten Dharmasraya salah satu batu cincin yang banyak dicari oleh pengoleksi maupun penjual.



Kabupaten Pesisir Selatan



Dasar Pembentukan

UU no 12 tahun 1956 Jis UU Drt no 21 tahun 1957 Jo UU no 58 tahun 1958

Ibukota

Painan

Alamat Kantor Bupati

Jalan. H. Agus Salim 1, Painan

Alamat Kantor DPRD

Painan, Iv Jurai, Painan, Iv Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Luas Wilayah

5.749,89 km².

Jumlah Penduduk (2017)

532.429 jiwa

Jumlah Wilayah Administrasi

15 kecamatan dan 182 nagari
42 SKPD dan 2 BUMD

Batas Wilayah

Utara : Kota Padang
Selatan : Kabupaten Mukomuko
Barat : Samudra Hindia
Timur : KabupatenSolok, kabupaten Solok Selatan

Website

www.pesisirselatankab.go.id

Pimpinan Dewan

Ketua DPRD : Ermizen, S.Pd.
Wakil Ketua I : Hakimin
Wakil Ketua II : Jamalus Yatim
Wakil Ketua III : H. Haprial Habas Buya Piai, S.H., M.H.

Pimpinan Daerah

Kepala Daerah : H. Hendrajoni, S.H., M.H.
Wakil Kepala Daerah : Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd.
Sekretaris Daerah : Ir. Erizon, MTP.
Inspektur : Akhda Yanuar, S.Kom.

Neraca Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014-2018

Tahun	Aset (Rp)	Kewajiban (Rp)	Ekuitas (Rp)
2018	2.119.482.060.722,09	66.837.847.630,20	2.052.644.213.091,89
2017	1.997.168.847.561,71	70.862.123.757,48	1.926.306.723.804,22
2016	2.081.442.252.462,43	72.218.574.158,34	2.009.223.678.304,09
2015	1.909.042.677.273,85	41.153.294.949,83	1.867.889.382.324,02
2014	1.740.772.449.572,46	7.696.513.852,00	1.733.075.935.720,46

Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan TA 2014-2018

Tahun	Anggaran		Realisasi	
	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)
2018	1.609.033.648.934,00	1.493.532.280.831,00	1.529.141.850.638,36	1.327.619.178.497,95
2017	1.539.542.108.506,00	1.445.449.469.499,77	1.515.058.426.871,05	1.270.115.705.143,60
2016	1.577.041.581.597,00	1.799.424.409.818,85	1.457.940.857.432,74	1.500.649.148.344,62
2015	1.364.126.655.860,00	1.587.388.623.892,60	1.376.803.899.873,07	1.359.853.635.220,82
2014	1.170.013.722.863,00	1.259.770.403.538,71	1.174.349.091.058,34	1.143.199.497.048,00

Sebagian besar penduduk Pesisir Selatan bergantung pada sektor pertanian tanaman pangan, perikanan dan perdangan. Sementara sumber daya potensial lainnya adalah pertambangan, perkebunan dan pariwisata. Sektor perkebunan terutama perkebunan sawit mulai berkembang pesat sejak sepuluh tahun terakhir. Melibatkan beberapa investor nasional dengan pola perkebunan inti dan plasma.

Kabupaten Pesisir selatan sebagai daerah pesisir barat Pulau Sumatera memiliki sumber daya alam berupa daerah pantai yang luas dan daerah kepulauan yang tersebar di sepanjang Pantai Barat pulau Sumatera. Topografi daerah yang beragam antara pantai, dataran, gunung, perbukitan dan hutan mengharuskan daerah ini mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki. Jika berkunjung ke Pesisir Selatan, jangan lewatkan untuk mengunjungi kawasan wisata Mandeh. Kawasan ini sering disebut sebagai Raja Ampat dari Barat karena keindahannya tidak kalah dengan destinasi wisata dari Timur itu.



Kabupaten Sijunjung



Dasar Pembentukan

Ibukota

Muaro Sijunjung

Alamat Kantor Bupati

Jalan Prof. M. Yamin, SH No. 53 Muara Sijunjung

Alamat Kantor DPRD

Lalan, Lubuk Tarok, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat 27564

Luas Wilayah

3.130,80 km²

Jumlah Penduduk (2014)

201.627 jiwa

Jumlah Wilayah Administrasi

8 Kecamatan, 61 Nagari dan 1 desa
35 SKPD dan 3 BUMD

Batas Wilayah

- Utara : Kabupaten Tanah Datar
- Selatan : Kabupaten Dharmasraya
- Barat : Kabupaten Solok dan Kota Sawahlunto
- Timur : Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau

Website

www.sijunjung.go.id

Pimpinan Dewan

Ketua DPRD : H. Bambang Surya Irwan

Wakil I : Bakri, S.H. Dt. Majo Indo

Wakil II : Syofyan Hendri, S.Pdi.

Pimpinan Daerah

Kepala Daerah : Drs. H. Yuswir Arifin Dt. Indo Marajo, M.M.

Wakil Kepala Daerah : H. Arrival Boy, S.H.

Sekretaris Daerah : Zefnihan, A.P., M.Si.

Inspektur : Welfiadril, S.Sos, M.Pd.

Neraca Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2014-2018

Tahun	Aset (Rp)	Kewajiban (Rp)	Ekuitas (Rp)
2018	1.681.904.631.169,28	10.512.758.566,00	1.671.391.872.603,28
2017	1.604.974.577.372,89	12.020.728.094,90	1.592.953.849.277,99
2016	1.530.929.712.427,15	18.812.280.806,00	1.512.117.431.621,15
2015	1.225.642.576.645,67	8.426.509.328,00	1.217.216.067.317,67
2014	1.976.502.927.276,38	829.233.496,00	1.975.673.693.780,38

Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Sijunjung TA 2014-2018

Tahun	Anggaran		Realisasi	
	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)
2018	954.029.472.967,00	967.142.067.230,80	941.608.636.209,38	849.228.998.437,42
2017	1.002.836.393.118,00	939.841.020.643,00	975.949.625.569,07	783.134.666.234,00
2016	921.976.327.696,00	925.974.547.730,00	884.731.195.663,91	830.645.925.016,00
2015	834.500.643.901,00	867.810.895.251,48	828.391.856.538,12	746.572.178.557,00
2014	742.483.113.892,00	779.352.567.516,26	748.241.681.501,22	685.373.396.404,00

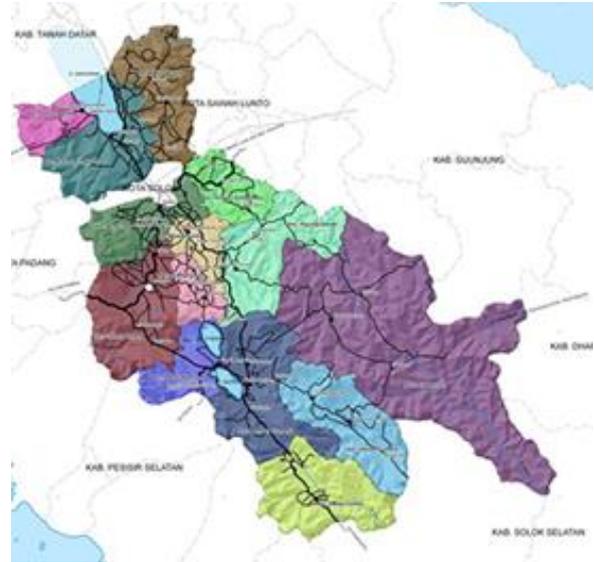
Kondisi dan topografi Kabupaten Sijunjung bervariasi pada setiap wilayah antara bukit, bergelombang dan dataran. Beberapa kecamatan berada pada lahan curam dan sangat curam (daerah berbukit), yaitu di Kecamatan Tanjung Gadang, Kecamatan Sijunjung, Kecamatan Sumpur Kudus, dan Kecamatan Lubuak Tarok dengan kemiringan antara 15 – 40 % dan lebih besar dan 40%. Hanya sebagian kecil wilayah Kabupaten Sijunjung yang dikategorikan sebagai dataran.

Secara Topografi Kabupaten Sijunjung merupakan rangkaian bukit barisan yang memanjang dan arah barat laut – tenggara. Morfologi daerah dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu terjal pada bagian barat dan timur, dataran dibagian tengah dan perbukitan landai yang terletak diantaranya.

Wilayah kabupaten ini memiliki banyak potensi dalam berbagai bidang. Berbagai jenis industri pengolahan di Kabupaten Sijunjung menjadikan sektor industri pengolahan sebagai salah satu sektor yang potensial untuk dikembangkan. Beberapa peluang investasi untuk pemberdayaan industri di Kabupaten Sijunjung diantaranya adalah industri kerajinan tikar pandan dan kerajinan kain tenun. Potensi pertambangan terbagi atas mineral logam yaitu emas, batuan seperti andesit, tanah liat, sitrukil, pasir kuarsa dan batubara yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Sijunjung. Kabupaten Sijunjung juga merupakan salah satu Kabupaten di Sumatera Barat yang memiliki potensi wisata yang sangat potensial. Potensi wisata tersebut meliputi potensi wisata alam, budaya dan wisata buatan yang tersebar di beberapa kecamatan diantaranya adalah Wisata Ngalau Talago dan Air Terjun Palukan.



Kabupaten Solok



Dasar Pembentukan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956

Ibukota

Arosuka

Alamat Kantor Kepala Daerah

Jalan Kayu Aro, Sukarami, Solok

Alamat Kantor DPRD

Jl. Syamsu Tulus, Nan Balimo, Tj. Harapan,
Kota Solok, Sumatera Barat 27326

Luas Wilayah

378.800 ha

Jumlah Penduduk (2010)

348.566 jiwa

Jumlah Wilayah Administrasi

14 Kecamatan, 74 Nagari
42 SKPD dan 2 BUMD

Batas Wilayah

Utara : Kabupaten Tanah datar
Selatan : Kabupaten Solok Selatan
Barat : Kota Padang Dan Kab.
Pesisir Selatan
Timur : Kabupaten Sijunjung

Website

www.solokkab.go.id

Pimpinan Dewan

Ketua DPRD : Jon Firman Pandu
Wakil I : Renaldo Gusmal, S.E.
Wakil II : Lucki Efendi

Pimpinan Daerah

Kepala Daerah : H. Gusmal, S.E., M.M.
Wakil Kepala Daerah : Yulfadri Nurdin, S.H.
Sekretaris Daerah : Azwirman, S.E., M.M.
Inspektur : Hermantias N., S.H.

Neraca Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2014-2018

Tahun	Aset (Rp)	Kewajiban (Rp)	Ekuitas (Rp)
2018	1.698.249.570.573,29	11.782.059.949,19	1.686.467.510.624,10
2017	1.535.448.946.175,37	4.669.864.721,86	1.530.779.081.453,51
2016	1.576.779.654.243,73	10.195.842.489,50	1.566.583.811.754,23
2015	1.434.360.566.995,67	3.603.617.230,49	1.430.756.949.765,18
2014	1.831.964.059.018,18	3.801.722.492,00	1.828.162.336.526,18

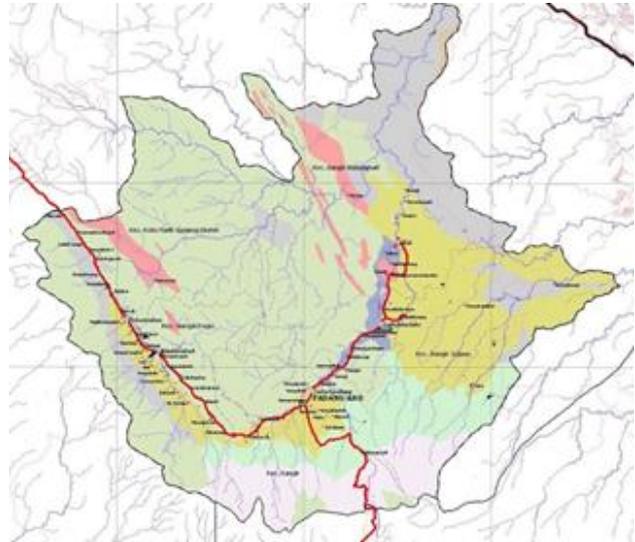
Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Solok TA 2014-2018

Tahun	Anggaran		Realisasi	
	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)
2018	1.203.924.288.807,00	1.101.162.070.568,79	1.163.604.738.667,08	1.028.481.783.757,84
2017	1.174.654.996.220,00	1.104.851.415.006,62	1.144.553.785.047,73	1.035.544.129.158,80
2016	1.139.852.450.673,00	1.147.313.603.063,62	1.128.678.628.074,52	1.056.989.893.017,85
2015	1.108.663.633.087,00	1.149.146.616.126,27	1.101.484.693.326,25	999.883.287.638,41
2014	981.547.156.320,00	1.067.858.179.633,58	988.804.498.525,00	948.937.934.457,64

Kabupaten Solok memiliki pesona alam yang tidak dimiliki daerah lain seperti pesona Danau Diatas dan Danau Dibawah, Danau Singkarak, Danau Talang serta Danau Tuo. Kemudian juga terdapat Gunung Talang yang masih aktif dan hamparan hijau kebun teh di kawasan Kecamatan Gunung Talang serta banyak lainnya. Keunggulan komparatif di bidang pariwisata ini harus mampu dikelola dengan sebaik-baiknya untuk mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan ke Kabupaten Solok.



Kabupaten Solok Selatan



Dasar Pembentukan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003

Ibukota

Padang Aro

Alamat Kantor Bupati

Jalan Raya Lubuk Gadang Kecamatan Sangir
Kabupaten Solok Selatan

Alamat Kantor DPRD

Lubuk Gadang, Sangir, Kabupaten Solok
Selatan, Sumatera Barat 27778

Luas Wilayah

359.013 ha

Jumlah Penduduk (2011)

147.639 jiwa

Jumlah Wilayah

7 Kecamatan, 39 Nagari
34 SKPD dan 2 BUMD

Batas Wilayah

Utara : Kabupaten Solok
Selatan : Propinsi Jambi
Barat : Kab. Pesisir Selatan
Timur : Kabupaten Sijunjung

Website

www.solselkab.go.id

Pimpinan Dewan

Ketua DPRD : Zigo Rolanda
Wakil Ketua I : Ali Sabri Abbas
Wakil Ketua II : Armen Syahjohan

Pimpinan Daerah

Kepala Daerah : H. Muzni Zakaria, M.Eng.
Wakil Kepala Daerah : Drs. H. Abdul Rahman, S.H., M.H.
Sekretaris Daerah : Ir. Yulian Efi, M.M.
Inspektur : Akmal Hamdi, S.H.

Neraca Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2014-2018

Tahun	Aset (Rp)	Kewajiban (Rp)	Ekuitas (Rp)
2018	1.802.642.385.364,33	17.124.861.473,00	1.785.517.523.891,33
2017	1.716.684.335.160,63	6.459.245.421,12	1.710.225.089.739,51
2016	1.677.234.003.881,10	6.682.856.516,48	1.670.551.147.364,62
2015	1.592.515.927.742,94	4.083.165.537,00	1.588.432.762.205,94
2014	995.750.562.971,74	5.284.658.808,00	990.465.904.163,74

Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Solok Selatan TA 2014-2018

Tahun	Anggaran		Realisasi	
	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)
2018	816.277.942.115,00	743.239.063.836,00	794.740.411.203,43	701.125.082.612,12
2017	821.566.342.111,00	781.570.585.487,00	795.830.635.611,93	735.944.837.660,00
2016	777.888.333.576,00	785.937.310.493,00	776.513.084.983,00	737.800.045.809,98
2015	737.791.461.762,00	760.223.621.430,00	739.447.807.717,64	673.853.815.917,35
2014	640.675.214.248,00	642.951.729.613,00	630.492.374.821,16	578.477.701.530,00

Berdasarkan peta geologi, Kabupaten Solok Selatan memiliki potensi sumber daya mineral. Sumberdaya mineral tersebut antara lain terdiri dari mineral logam berupa tembaga, emas, perak; potensi panas bumi yang ditandai oleh munculnya mata air panas dan bahan galian berupa batu gamping, pasir dan batu sungai. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga akan menjadikan air terjun dua tingkat Tangsi Ampek di Kecamatan Sangir, menjadi ikon pariwisata di daerah itu.

Dalam rangka mendukung pengembangan di bidang *creative tourism* di Solok Selatan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok Selatan bekerjasama dengan Surya University akan melakukan perancangan dan pemodelan *creative tourism* dengan optimalisasi pemanfaatan potensi daerah. Potensi daerah yang ingin ditonjolkan adalah alamnya yang indah, hasil tambang emas dan bijih besi yang melimpah, hasil perkebunan, hasil kerajinan maupun produk kesenian dan sebagainya. Program ini diwujudkan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok Selatan Provinsi Sumatra Barat dan Universitas Surya, pada 5 Desember 2014, di Kampus Surya University, Tangerang. Bertindak sebagai penandatanganan adalah Prof. Yohanes Surya, Ph.D., selaku pendiri sekaligus Rektor Universitas Surya, dan H. Muzni Zakaria M. Eng., selaku Bupati Solok Selatan.



Kota Pariaman



Dasar Pembentukan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002
tanggal 10 April 2002

Ibukota

Parit Malintang

Alamat Kantor Walikota

Jalan Syeh Burhanuddin, Pariaman

Alamat Kantor DPRD

Kp. Perak, Pariaman Tengah, Kota
Pariaman, Sumatera Barat 25513

Luas Wilayah

73,36 km²

Jumlah Penduduk (2010)

97.901 jiwa

Jumlah Wilayah Administrasi

4 kecamatan, 71 Kelurahan/Desa
29 SKPD dan 0 BUMD

Batas Wilayah

- Utara : kecamatan V Koto
Kampung Dalam,
kabupaten Padang
Pariaman
- Selatan : kecamatan Nan Sabaris,
kabupaten Padang
Pariaman
- Barat : Samudera Hindia
- Timur : kecamatan VII Koto
Sungai Sarik, kabupaten
Padang Pariaman

Website

www.pariamankota.go.id

Pimpinan Dewan

Ketua DPRD : Fitri Nora, A.Md
Wakil I : Faisal, S. Pd.
Wakil II : Mulyadi

Pimpinan Daerah

Kepala Daerah : Dr. Genius Umar, S.Sos., M.Si.
Wakil Kepala Daerah : Drs. Mardison Mahyuddin, M.M.
Sekretaris Daerah : Indra Sakti, S.H., M.M.
Inspektur : Yota Balad, S. STP., M. Si.

Neraca Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2014-2018

Tahun	Aset (Rp)	Kewajiban (Rp)	Ekuitas (Rp)
2018	833.400.056.881,17	76.035.902,32	833.324.020.978,85
2017	821.666.520.449,13	8.124.718.188,35	813.541.802.260,78
2016	880.690.952.872,25	7.904.820.080,68	872.786.132.791,56
2015	814.013.824.616,01	7.980.408.068,35	806.033.416.547,66
2014	1.075.464.439.668,28	7.655.049.880,35	1.067.809.389.787,93

Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Kota Pariaman TA 2014-2018

Tahun	Anggaran		Realisasi	
	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)
2018	653.325.805.028,51	622.513.381.935,53	627.169.121.763,69	542.725.474.889,73
2017	659.243.224.334,47	633.218.175.998,47	639.032.751.955,42	550.618.707.277,40
2016	599.857.784.593,30	720.203.333.887,57	621.535.178.051,91	664.690.733.675,18
2015	584.071.942.218,00	708.177.582.078,77	573.471.864.431,50	579.810.102.498,00
2014	570.681.714.908,00	658.433.555.060,33	552.365.209.077,98	505.918.261.869,54

Kota Pariaman menonjol dari sektor pariwisata bahari secara berkesinambungan karena memiliki pantai landai dengan pesona yang indah. Objek wisata pantai Pariaman di antaranya yang paling terkenal adalah pantai Gandoriah yang berlokasi di depan stasiun kereta api Pariaman yang dilengkapi dengan sarana prasarana seperti Anjungan, Pujasera, Plaza Gandoriah, Dermaga Apung, Monumen Perjuangan TNI AL, Gandoriah Bridge dan Jembatan Muaro. Pantai Kata dengan Taman Kota (Ex. Astaka MTQ Nasional Provinsi), Air Mancur menari, Anjungan, Resort dan Monumen Ikan di Karan Aua-Taluak, Pantai Pasir Lohong dengan Taman Anas Malik dan Taman Pemuda Asean (Asean Young Park) di Lohong, Pantai Cermin di Karan Aua, Rawa Mati di Mangguang, Pantai Belibis di Nareh dan memiliki Hutan bakau serta Pusat Penangkaran Penyu pertama di Sumatra Barat di Pantai Penyu, Apa, Kec. Pariaman Utara.

Selain itu Kota yang bermotto Sabiduak Sadayuang ini juga memiliki 6 (enam) pulau kecil yang tak berpenghuni yang terus dikembangkan sarana dan prasarananya sebagai destinasi wisata oleh Pemerintah Kota setempat di antaranya Pulau Angso Duo, Pulau Bando, Pulau Gosong, Pulau Ujuang, Pulau Tengah dan Pulau Kasiak.

Kota ini juga dikenal dengan pesta budaya tahunan tabuik yang prosesi acaranya diselenggarakan mulai dari tanggal 1 Muharam sampai pada puncaknya tanggal 10 Muharam setiap tahunnya. Saat ini terdapat 2 museum rumah Tabuik yakni Rumah Tabuik Subarang di Jl. Imam Bonjol, Cimparuah Samping Balai Kota dan Rumah Tabuik Pasa di Jl. Syekh Burhanuddin, Karan Aua yang memuat informasi sejarah perkembangan dan pembuatan tabuik beserta replikanya.



Kota Sawahlunto



Dasar Pembentukan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956

Ibukota

Sawahlunto

Alamat Kantor Walikota

Jalan Prof. M. Yamin SH No. 70 Kota
Sawahlunto

Alamat Kantor DPRD

:
Pasar, Lembah Segar, Kota Sawah Lunto,
Sumatera Barat 27422

Luas Wilayah

27.345 ha atau 273,45 km²

Jumlah Penduduk (2008)

54.310 jiwa

Jumlah Wilayah Administrasi

4 Kecamatan, 10 Kelurahan, 27 Desa
27 SKPD dan 4 BUMD

Batas Wilayah

Utara : Kabupaten Tanah Datar
Selatan : Kabupaten Solok
Barat : Kabupaten Solok
Timur : Sawahlunto/-Sijunjung

Website

www.sawahluntokota.go.id

Pimpinan Dewan

Ketua DPRD : Eka Wahyu, S.E.

Wakil I : Jaswandi, S.E.

Wakil II : Elfia Rita Dewi, S.H.

Pimpinan Daerah

Kepala Daerah : Deri Asta, S.H.

Wakil Kepala Daerah : Zohirin Sayuti, S.E.

Pj. Sekretaris Daerah : Drs. Irzam K., M.M.

Inspektur : Isnedi, S.E.

Neraca Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2014-2018

Tahun	Aset (Rp)	Kewajiban (Rp)	Ekuitas (Rp)
2018	869.154.740.431,46	25.021.624.640,60	844.133.115.790,86
2017	820.786.038.048,54	38.896.775.219,71	781.889.262.828,83
2016	645.974.565.708,68	31.691.062.848,14	614.283.502.850,54
2015	829.540.953.864,94	22.629.761.721,00	806.911.192.143,94
2014	1.001.156.316.004,57	23.284.585.455,56	977.871.730.549,01

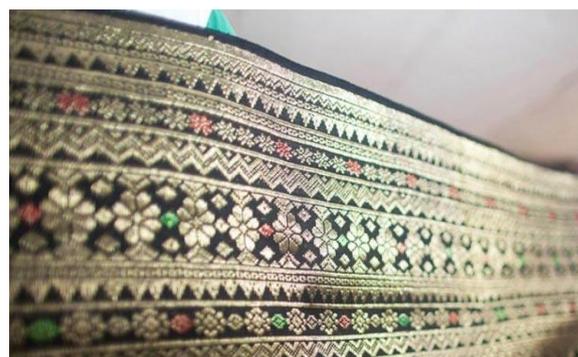
Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Kota Sawahlunto TA 2014-2018

Tahun	Anggaran		Realisasi	
	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)
2018	621.509.738.839,00	640.360.399.508,98	586.463.778.018,45	582.394.700.607,61
2017	608.862.187.955,00	639.418.663.508,98	584.882.133.253,37	586.462.126.161,19
2016	601.416.292.738,00	659.684.663.922,00	588.738.442.431,54	602.138.436.500,12
2015	545.543.340.291,00	620.844.550.768,60	537.483.538.214,19	547.268.450.211,56
2014	493.336.238.280,00	535.419.239.942,10	488.405.317.004,27	453.594.509.165,74

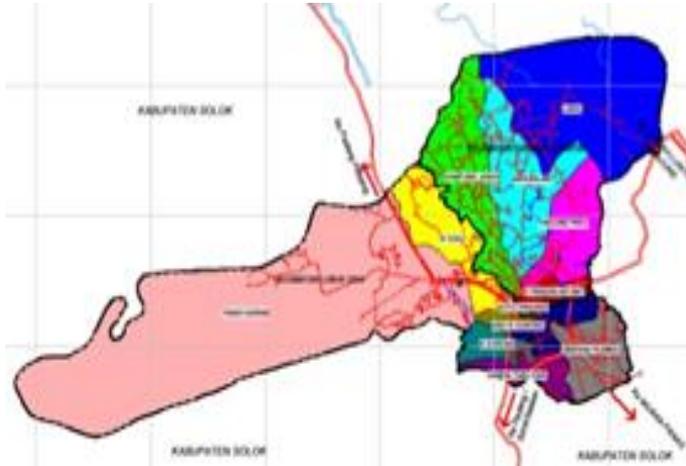
Tahun 2019 UNESCO telah menetapkan Pertambangan Ombilin di Sawahlunto (*Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto*) sebagai Warisan Dunia. Selama seratus tahun lebih, batu bara telah dieksploitasi mencapai sekitar 30 juta ton, dan masih tersisa cadangan lebih dari 100 juta ton. Namun masa depan penambangan batu bara di Kota Sawahlunto masih belum jelas, sebab cadangan yang tersisa hanya bisa dieksploitasi sebagai tambang dalam. Sedangkan dapat tidaknya eksploitasi tersebut sangat bergantung kepada penguasaan teknologi dan permintaan pasar.

Kota Sawahlunto memiliki potensi wilayah berupa sumber daya alam dan objek wisata tambang. Kota Sawahlunto juga memiliki banyak bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda sebagai objek wisata, seperti Gedung Pusat Kebudayaan Sawahlunto, Kantor PT Bukit Asam Unit Pertambangan Ombilin, Lubang Suro (bekas area pertambangan), Silo (tempat menimbun batubara), Museum Gudang Ransum, Lokomotif Mak Itam dan Museum Kereta Api Sawahlunto.

Kota Sawahlunto juga terkenal dengan tenun songket asal Silungkang yang terkenal memiliki kualitas tinggi, bukan hanya kilau benang emas beragam motif unik tetapi juga fungsi sosial sebagai alat kelengkapan busana tradisional.



Kota Solok



Dasar Pembentukan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956

Ibukota

Solok

Alamat Kantor Walikota

Jalan Lubuk Sikarah 89, Solok

Alamat Kantor DPRD

Jl. Syamsu Tulus, Nan Balimo, Tj. Harapan,
Kota Solok, Sumatera Barat 27326

Luas Wilayah

57,64 km²

Jumlah Penduduk (2010)

59.317 jiwa

Jumlah Wilayah Administrasi

2 kecamatan dengan 13 Kelurahan
41 SKPD dan 1 BUMD

Batas Wilayah

Utara : Kecamatan Nagari Tanjung
Bingkuang, Aripandan dan Kuncir
Kabupaten Solok

Selatan : Kecamatan Nagari Gaung,
Panyakalan, Koto Baru, Selayo
Kabupaten Solok, Nagari Muaro
Panah dan Kota Padang

Barat : Kecamatan Nagari Selayo, Koto
Sani Kabupaten Solok

Timur : Kecamatan Nagari Saok Laweh,
Guguk Sarai dan Kecamatan
Gaung Kabupaten Solok

Website

www.solokkota.go.id

Pimpinan Dewan

Ketua DPRD : Yutris Can, S.E.
Wakil Ketua I : Bayu Kharisma
Wakil Ketua II : Efriyon Coneng

Pimpinan Daerah

Kepala Daerah : H. Zul Elfian Dt. Tianso, S.H., M.Si.
Wakil Kepala Daerah : Reinier Dt. Intan Batuah, S.T., M.M.
Sekretaris Daerah : Drs. Syaiful A, M. Si.
Inspektur : Kenfilka, S.H., M.H

Neraca Pemerintah Kota Solok Tahun 2014-2018

Tahun	Aset (Rp)	Kewajiban (Rp)	Ekuitas (Rp)
2018	1.440.883.615.415,91	175.550.758,53	1.440.708.064.657,38
2017	1.406.995.150.842,58	2.892.241.955,85	1.404.102.908.886,73
2016	1.373.002.012.240,98	10.431.148.760,16	1.362.570.863.480,82
2015	1.236.814.622.566,33	10.588.310.961,96	1.226.226.311.604,37
2014	1.513.516.292.011,58	10.135.839.874,77	1.503.380.452.136,81

Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Kota Solok TA 2014-2018

Tahun	Anggaran		Realisasi	
	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)
2018	577.187.055.174,00	717.644.238.082,88	565.850.388.710,40	648.548.438.881,20
2017	617.608.693.004,00	724.477.422.174,85	597.241.847.253,12	556.789.190.793,09
2016	601.923.319.524,00	704.857.316.765,32	573.544.451.667,98	548.992.336.460,45
2015	519.617.706.797,30	586.075.575.817,17	524.519.843.153,45	477.740.630.854,00
2014	477.881.777.675,00	527.685.196.554,54	489.525.802.312,46	452.972.592.178,46

Kota Solok di Sumatera Barat terkenal dengan sebutan kota beras. Sebagian besar penduduknya memang berprofesi sebagai petani yang memproduksi beras dengan kualitas paling baik di Sumbar. Karena letaknya yang strategis, kota ini juga ingin menjadi kota perdagangan dan jasa. Potensi wisata yang menjanjikan, membuat Pemerintah Kota Solok berencana untuk mengembangkan Puncak Bidadari yang berada di Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, sebagai salah satu tujuan wisata di daerah ini.

Di Kota Solok terdapat beberapa objek wisata baik berupa objek wisata alam maupun objek wisata sejarah/budaya yang tersebar pada 2 kecamatan. Objek wisata alam yang menjadi fokus pengembangan di masa mendatang adalah Taman Rekreasi Pulau Belibis yang terletak di kelurahan Kampung Jawa dan berjarak + 3 km dari pusat kota. Pulau Belibis merupakan suatu kawasan wisata yang didukung oleh beberapa objek wisata seperti Taman Pramuka dan Arena Pacuan kuda Ampang Kualo. Pada kawasan ini terdapat sebuah telaga yang cukup besar dan hidup sejenis unggas yang dinamakan Burung Belibis. Kawasan ini juga dilengkapi arena pancing, taman burung dan arena bermain anak-anak.



Kabupaten Kepulauan Mentawai



Dasar Pembentukan

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999

Ibukota

Tua Pejat

Alamat Kantor Bupati

Jalan Raya Tuapejat km. 5 Sipora, Mentawai

Alamat Kantor DPRD

Jl. Kecamatan Sikabaluhan Siberut, Sumbar
Sumatera Barat.

Luas Wilayah

512.044 hektar.

Jumlah Penduduk (2015)

85.348 jiwa

Jumlah Wilayah Administrasi

10 kecamatan, 43 desa dan 202 dusun
35 SKPD dan 0 BUMD

Batas Wilayah

Utara : Nias Selatan
Selatan : Kabupaten Pesisir Selatan
Barat : Samudera Indonesia
Timur : Kabupaten Padang
Pariaman, Kota Padang dan
Kabupaten Pesisir Selatan

Website

www.mentawaikab.go.id

Pimpinan Dewan

Ketua DPRD : Yosep A. Md
Wakil Ketua I : Isar Taileleu, S.PAK
Wakil Ketua II : Jakop Saguruk, S.E.

Pimpinan Daerah

Kepala Daerah : Yudas Sabaggalet, S.E., M.M.
Wakil Kepala Daerah : Kortanius Sabeleake, S.Pt.
Sekretaris Daerah : Martinus Dahlan, S.Sos., M.M.
Inspektur : Drs. Miko Siregar, M.Si.

Neraca Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2014-2018

Tahun	Aset (Rp)	Kewajiban (Rp)	Ekuitas (Rp)
2018	1.509.079.864.555,07	17.566.669.057,00	1.491.513.195.498,07
2017	1.412.704.597.903,15	55.877.156.809,00	1.356.827.441.094,15
2016	1.485.756.263.116,42	1.632.299.994,00	1.667.031.491.934,72
2015	1.485.756.263.116,42	1.624.903.224,00	1.484.131.359.892,42
2014	1.666.860.663.659,86	1.613.091.698,00	1.665.247.571.961,86

Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai TA 2014-2018

Tahun	Anggaran		Realisasi	
	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)
2018	945.010.668.801,61	927.594.541.149,17	913.545.022.458,56	791.551.495.406,23
2017	950.171.885.842,82	1.094.088.410.523,43	917.793.849.299,42	913.887.353.078,73
2016	947.365.769.203,00	1.121.968.225.263,72	910.036.777.554,73	893.175.252.945,45
2015	856.209.005.566,32	979.231.907.698,97	828.970.064.135,40	766.176.640.610,33
2014	718.979.616.792,46	832.864.953.288,06	695.651.439.435,24	658.502.559.409,43

Masyarakat setempat menyebut negeri mereka dengan nama Bumi Sikerei. Sebahagian besar penghuni pulau-pulau di kabupaten Kepulauan Mentawai berasal dari pulau Siberut. Daerah ini memiliki potensi alam yang banyak. Kabupaten yang memiliki garis pantai 758 kilometer ini memiliki potensi perikanan yang cukup besar. Di perairan sepanjang pantai itulah tersimpan kekayaan laut yang cukup potensial seperti kerapu, kakap, tongkol, teripang, dan rumput laut. Kerapu dari perairan Kepulauan Mentawai bahkan menjadi komoditas ekspor. Potensi pariwisata juga tidak kalah menarik. Perairan Mentawai dikenal sebagai tempat paling menantang untuk pecinta olahraga selancar air atau surfing. Potensi pantai yang terkenal untuk olah raga selancar ini menjadi incaran wisatawan mancanegara. Lokasi selancar terdapat di Nyangnyang, Karang Bajat, Karoniki, dan Pananggalat Mainuk di Kecamatan Siberut Selatan, Katiet Bosua di Kecamatan Sipora, serta pantai selatan dan barat Kecamatan Pagai Utara.



Kota Padang



Dasar Pembentukan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956

Ibukota

Padang

Alamat Kantor Walikota

Jalan By. Pass Km. 13 Aie Pacah

Alamat Kantor DPRD

Jl. Sawahan No.50, Sawahan Tim., Padang Tim., Kota Padang, Sumatera Barat 25171

Luas Wilayah

694,96 km²

Jumlah Penduduk (2017)

927.168 jiwa

Jumlah Wilayah Adiminstrasi

11 kecamatan, 104 kelurahan
41 SKPD dan 6 BUMD (lima tidak aktif)

Batas Wilayah

Utara : Kabupaten Padang
Pariaman
Selatan : Kabupaten Pesisir Selatan
Barat : Samudera Hindia
Timur : Kabupaten Solok.

Website

www.padang.go.id

Pimpinan Dewan

Ketua DPRD : H. Syafrial Kani, S.H.

Wakil I : Arnedi Yarmen, S.Pd

Wakil II : Amril Amin, S.AP

Wakil III : Ilham Maulana, S.H.

Pimpinan Daerah

Kepala Daerah : H. Mahyeldi Ansharullah, S.P.

Wakil Kepala Daerah : Hendri Septa, BBus (Acc)., M.I.B

Sekretaris Daerah : Amasrul, S.H.

Inspektur : H. Andri Yulika, S.H., M.Hum.

Neraca Pemerintah Kota Padang Tahun 2014-2018

Tahun	Aset (Rp)	Kewajiban (Rp)	Ekuitas (Rp)
2018	7.125.104.872.207,53	59.626.468.267,00	7.065.478.403.940,53
2017	7.124.735.437.140,93	107.459.874.849,51	7.017.275.562.291,42
2016	6.881.114.488.677,77	57.744.527.440,26	6.823.369.961.237,51
2015	6.799.935.297.356,58	13.911.474.696,51	6.786.023.822.660,07
2014	7.885.040.700.284,65	9.505.932.023,31	7.875.534.768.261,34

Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Kota Padang TA 2014-2018

Tahun	Anggaran		Realisasi	
	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)
2018	2.360.791.801.476,00	2.486.534.455.451,57	2.160.375.621.454,61	2.177.972.844.481,00
2017	2.177.091.356.188,00	2.339.522.587.754,21	2.092.277.707.122,03	2.077.455.348.192,00
2016	2.000.873.481.496,00	2.345.757.224.592,62	1.969.422.052.716,92	2.173.503.996.314,00
2015	2.071.126.010.240,00	2.408.291.804.913,53	1.947.485.616.093,05	1.948.501.777.319,96
2014	1.934.378.053.805,90	2.143.967.152.247,99	1.913.522.926.784,44	1.794.324.395.903,00

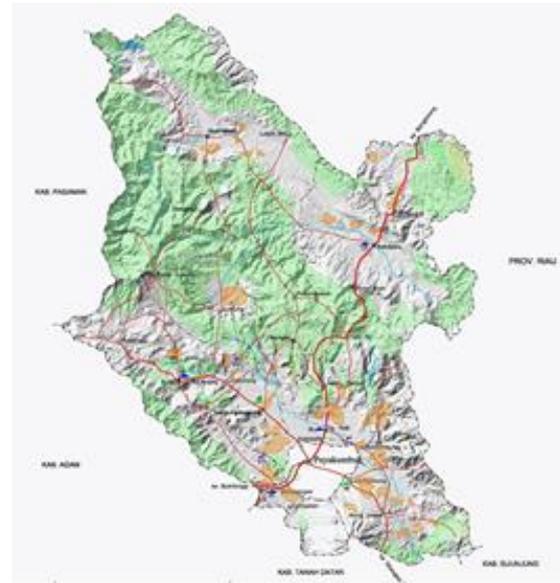
Kota Padang merupakan sentra perekonomian dengan jumlah pendapatan per kapita tertinggi di Sumatera Barat. Selain itu, kota ini menjadi pusat pendidikan dan kesehatan di wilayah Sumatera bagian tengah, didukung dengan keberadaan sejumlah perguruan tinggi dan fasilitas kesehatan.

Sebagai kota seni dan budaya, Padang dikenal dengan legenda Malin Kundang dan Siti Nurbaya, dan setiap tahunnya menyelenggarakan berbagai festival untuk menunjang sektor kepariwisataan.

Di kalangan masyarakat Indonesia, nama kota ini umumnya diasosiasikan dengan etnis Minangkabau dan masakan khas mereka yang umumnya dikenal sebagai masakan Padang. Masakan Padang yang terkenal adalah rendang yang telah dinobatkan oleh CNN International sebagai hidangan peringkat pertama dalam daftar *World's 50 Most Delicious Foods* (50 Hidangan Terlezat Dunia). Kota Padang menyediakan toko souvenir yang menjual buah tangan khas Sumatera Barat yaitu keripik sanjay, rendang, batik tanah liok, bahkan silungkang.



Kabupaten Lima Puluh Kota



Dasar Pembentukan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956

Ibukota

Sarilamak

Alamat Kantor Bupati

Bukit Limau, Simaralak Jalan Raya Negara
Km. 10 Kecamatan Harau Lima Puluh Kota

Alamat Kantor DPRD

Bukit Limau, Jl. Burhanuddin Putihah,
Sarilamak (26271) Kecamatan Harau
Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi
Sumatera Barat.

Luas Wilayah

3.354,30 km²

Jumlah Penduduk (2010)

348.555 jiwa

Jumlah Wilayah Administrasi

13 Kecamatan dan 180 Kelurahan
42 SKPD dan 2 BUMD

Batas Wilayah

Utara	: Provinsi Riau
Selatan	: Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung
Barat	: Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman,
Timur	: Provinsi Riau

Website

www.limapuluhkotakab.go.id

Pimpinan Dewan

Ketua DPRD : Deni Asra, S.Si
Wakil I : Wendi Chandra, S.T.
Wakil II : Syamsul Mikar

Pimpinan Daerah

Kepala Daerah : Ir. Irfendi Arbi, M.P.
Wakil Kepala Daerah : Ferizal Ridwan, S.Sos.
Sekretaris Daerah : Widya Putra, S.Sos, M.Si
Inspektur : Suherman, S.E.

Neraca Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014-2018

Tahun	Aset (Rp)	Kewajiban (Rp)	Ekuitas (Rp)
2018	1.614.113.052.518,59	3.081.320.755,00	1.611.031.731.763,59
2017	1.500.307.414.192,95	3.095.629.601,00	1.497.211.784.591,95
2016	1.482.209.479.136,52	2.478.129.526	1.479.731.349.610,52
2015	1.417.964.628.700,83	5.052.497.956	1.412.912.130.744,23
2014	1.986.446.526.069,48	3.591.807.971,64	1.982.854.718.097,84

Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota TA 2014-2018

Tahun	Anggaran		Realisasi	
	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)
2018	1.274.660.034.522,00	1.198.186.411.292,00	1.257.168.413.662,03	1.103.111.883.976,00
2017	1.288.874.849.392,00	1.194.327.703.589,50	1.275.862.309.267,64	1.108.720.993.539,00
2016	1.217.956.019.682,00	1.251.849.594.321,56	1.178.893.526.250,94	1.153.665.477.073,00
2015	1.146.800.244.462,00	1.174.673.049.875,00	1.137.680.232.017,49	1.041.502.025.352,83
2014	1.000.375.033.639,00	1.062.338.073.204,00	1.004.220.871.876,69	985.609.935.749,00

Potensi yang terdapat pada Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sektor pertanian, sektor perdagangan dan UMKM, sektor industri pengolahan, sektor pertambangan serta sektor pariwisata. Salah satu komoditas unggulan subsektor perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah gambir. Pada sektor pariwisata, Kabupaten Lima Puluh Kota dikenal dengan lembah harau dan flyover kelok sembilan. Pariwisata pada Kabupaten Lima Puluh Kota mengandalkan pemandangan alam yang tetap dijaga keasriannya.



Kabupaten Padang Pariaman



Dasar Pembentukan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
tanggal 19 Maret 1956

Ibukota

Parit Malintang

Alamat Kantor Bupati

Jalan Mohd. Syafei 10 Pariaman

Alamat Kantor DPRD

Kp. Perak, Pariaman Tengah, Kota
Pariaman, Sumatera Barat 25513

Luas Wilayah

1.328,79 km²

Jumlah Penduduk (2010)

391.056 jiwa

Jumlah Wilayah Administrasi

17 Kecamatan, 60 Nagari
44 SKPD dan 2 BUMD

Batas Wilayah

Utara : Kabupaten Agam
Selatan : Kota Padang
Barat : Selat Mentawai (Kota
Pariaman)
Timur : Kabupaten Solok dan
Kabupaten Tanah Datar

Website

www.padangpariamankab.go.id

Pimpinan Dewan

Ketua DPRD : Ir. Arwinsyah, M.T.

Wakil I : Aprinaldi, M.Pd

Wakil II : Risdianto S.T.

Pimpinan Daerah

Kepala Daerah : Drs. H. Ali Mukhni

Wakil Kepala Daerah : Suhatri Bur, S.E., M.M.

Sekretaris Daerah : Jonpriadi, S.E., M.M.

Inspektur : Hendra Aswara, S.S.T.P., M.M

Neraca Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2014-2018

Tahun	Aset (Rp)	Kewajiban (Rp)	Ekuitas (Rp)
2018	1.230.967.601.085,29	43.248.474.572,47	1.187.719.126.512,82
2017	1.293.847.951.538,90	7.462.455.392,97	1.286.385.496.145,93
2016	1.298.842.171.022,83	4.916.941.680,40	1.293.925.229.342,43
2015	1.213.927.435.619,96	5.809.333.197,00	1.208.118.102.422,96
2014	1.092.650.923.368,21	833.335.047,00	1.091.817.588.321,21

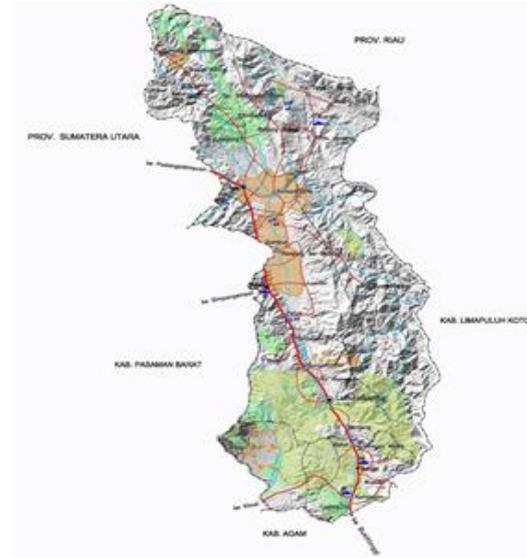
Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman TA 2014-2018

Tahun	Anggaran		Realisasi	
	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)
2018	1.466.361.930.430,30	1.316.014.029.655,46	1.309.985.762.673,02	1.242.195.893.069,33
2017	1.436.957.422.162,00	1.350.455.881.022,64	1.388.638.247.011,52	1.276.134.276.125,00
2016	1.351.128.053.695,00	1.399.041.293.715,00	1.353.306.741.300,52	1.336.323.358.548,30
2015	1.193.135.975.343,00	1.271.450.753.280,42	1.194.708.478.411,00	1.165.716.265.828,00
2014	1.065.292.271.101,32	1.126.346.821.140,45	1.069.627.598.087,10	1.045.817.153.269,81

Potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Padang Pariaman adalah sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor industri rumah tangga, sektor perikanan, sektor kelautan, dan sektor pariwisata. Sektor perkebunan yang menjadi komoditas pada kabupaten ini adalah kakao dan kelapa. Pada sektor pariwisata, Kabupaten Padang Pariaman mengandalkan keindahan alam seperti pantai dan bangunan-bangunan bersejarah seperti masjid tua Lubuk Barih.



Kabupaten Pasaman



Dasar Pembentukan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun

Ibukota

Lubuk Sikaping

Alamat Kantor Bupati

Jalan Sudirman 40, Lubuk Sikaping

Alamat Kantor DPRD

Jl. Jenderal Sudirman No.29, Pauah, Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat 26318

Luas Wilayah

3.947,63 km²,

Jumlah Penduduk (2015)

269.883 jiwa

Jumlah Wilayah Administrasi

12 Kecamatan dan 211 Kelurahan
39 SKPD dan 2 BUMD

Batas Wilayah

Utara : Provinsi Sumatera Utara
Selatan : Kabupaten Agam.
Barat : Sumatera Utara dan Kabupaten Pasaman Barat
Timur : Provinsi Riau dan Kabupaten Lima Puluh Kota

Website

www.pasamankab.go.id

Pimpinan Dewan

Ketua DPRD : Bustomi, S.E.
Wakil I : Danny Ismaya, S. Pt.
Wakil II : Yasri

Pimpinan Daerah

Kepala Daerah : AKBP (Purn.) H. Yusuf Lubis, S.H., M.Si.
Wakil Kepala Daerah : Mayor CZI (Purn.) H. Atos Pratama, S.T.
Sekretaris Daerah : Drs. H. Mara Ondak
Inspektur : M. Ikhsan, S. IP., M.Si.

Neraca Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun 2014-2018

Tahun	Aset (Rp)	Kewajiban (Rp)	Ekuitas (Rp)
2018	1.866.283.283.056,39	6.007.574.715,00	1.860.275.708.341,39
2017	1.820.714.113.676,37	23.621.034.566,00	1.797.093.079.110,37
2016	1.812.496.843.992,89	8.239.896.426,00	1.804.256.947.566,89
2015	1.663.340.747.178,30	2.253.201.366,00	1.661.087.545.812,30
2014	2.281.973.272.459,70	1.279.163.166,00	2.280.694.109.293,70

Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Pasaman TA 2014-2018

Tahun	Anggaran		Realisasi	
	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)
2018	1.025.591.124.712,58	996,293,795,709,19	988.438.487.804,65	882,012,244,058,00
2017	1,034,854,195,416,00	1,013,650,093,431,68	998.686.811.758,93	901,286,771,051,00
2016	1.029.074.184.818,00	1.061.807.151.519,57	971.661.069.847,19	927.804.380.303,08
2015	875.985.210.647,00	938.293.026.006,74	889.151.430.226,80	809.144.441.474,00
2014	795.925.939.000,00	852.663.781.313,57	813.401.928.360,17	740.356.952.397,00

Sumber pendapatan utama Kabupaten Pasaman berasal dari subsektor tanaman pangan. Mesti demikian, Kabupaten Pasaman lebih dikenal karena produksi kelapa sawitnya. Di samping kelapa sawit, Kabupaten Pasaman juga dikenal akan produksi minyak nilamnya. Minyak nilam yang dihasilkan Pasaman, selain yang dihasilkan Kepulauan Mentawai, merupakan yang terbaik di dunia.

Sektor pariwisata Kabupaten Pasaman didominasi oleh objek wisata alam dan objek wisata sejarah. Objek wisata alam yang cukup dikenal di Kabupaten Pasaman adalah Rimbo Panti, sedangkan objek wisata sejarah adalah Museum Tuanku Imam Bonjol.



Kabupaten Pasaman Barat



Dasar Pembentukan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003
tanggal 7 Januari

Ibukota

Simpang Empat

Alamat Kantor Kepala Daerah

Jalan Kihajar Dewantara No. 29, Simpang
Empat

Alamat Kantor DPRD

Aua Kuniang, Pasaman, Kabupaten Pasaman
Barat, Sumatera Barat 26566

Luas Wilayah

3.887,77 km²

Jumlah Penduduk (2015)

410.307 jiwa

Jumlah Wilayah Administrasi

11 kecamatan

42 SKPD dan 2 BUMD

Batas Wilayah

Utara : Provinsi Sumatera Utara

Selatan : Kabupaten Pasaman dan
Kabupaten Agam.

Barat : Samudera Hindia

Timur : Kabupaten Pasaman

Website

www.pasamanbaratkab.go.id

Pimpinan Dewan

Ketua DPRD : Parizal Hafni, S.T.
Wakil Ketua I : Endra Yama Putra, S.Pi.
Wakil Ketua II : H. Dalyus K., S.Si., M.M.

Pimpinan Daerah

Kepala Daerah : H. Yulianto, S.H., M.M.
Wakil Kepala Daerah : -----
Sekretaris Daerah : Yudesri, S.IP., M.Si.
Inspektur : Drs. Harisman Nasution

Neraca Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014-2018

Tahun	Aset (Rp)	Kewajiban (Rp)	Ekuitas (Rp)
2018	2.056.226.233.476,66	15.938.613.430,81	2,040,287,620,045.84
2017	1.875.011.786.828,30	16.899.515.014,00	1.858.112.271.814,30
2016	2.146.604.020.542,88	4.727.269.169,00	2.141.876.751.373,88
2015	1.893.123.963.667,17	12.841.172.785,33	1.880.282.790.881,84
2014	2.179.194.192.935,47	20.935.419.364,00	2.158.258.773.571,47

Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat TA 2014-2018

Tahun	Anggaran		Realisasi	
	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)
2018	1.239.418.937.504,00	1.220.889.778.439,00	1.134.285.630.198,25	1.100.116.599.399,06
2017	1.097.580.293.508,00	1.139.207.768.606,00	1.071.634.148.007,99	1.021.292.710.630,42
2016	1.092.716.224.286,00	1.153.242.924.577,00	1.069.252.362.654,57	989.653.911.084,50
2015	979.561.322.242,00	1.065.045.485.031,00	964.985.754.753,16	877.352.462.541,39
2014	870.938.377.303,00	925.172.084.236,00	880.805.350.711,20	807.964.932.271,00

Kabupaten yang beribukota di Simpang Ampek ini memiliki potensi daerah antara lain pada sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor pertambangan, sektor peternakan, sektor industri, dan sektor pariwisata. Komoditas utama Kabupaten Pasaman Barat adalah perkebunan sawit, jeruk, dan salak. Sektor pariwisata yang dikenal di Kabupaten Pasaman Barat adalah Pantai Sikilang, Pulau Panjang, dan Gunung Talamau.

Kabupaten muda ini mempunyai potensi wisata yang tidak kalah menariknya. Gunung Talamau yang terletak di Kabupaten Pasaman Barat ini merupakan satu dari beberapa gunung yang mempunyai panorama alam yang menarik di ranah Minangkabau. Dengan ketinggian 2.982 meter dpl menjadikan gunung tersebut sebagai puncak tertinggi di wilayah Sumatra Barat.

Gunung Talamau dapat didaki dari Desa Pinaga. Gunung ini mempunyai keunikan pada puncaknya yang memiliki banyak telaga dan menurut legenda, jumlah telaga tersebut selalu berbeda-beda dan tidak selalu sama setiap dijumpai para pendaki. Jumlah yang umum terlihat adalah 13 telaga. Gunung Talamau berdekatan sekali dengan Gunung Pasaman hanya dipisahkan oleh sebuah sungai. Dari daerah puncak Gunung Talamau, wisatawan dapat melihat dengan jelas puncak Gunung Pasaman atau dikenal juga sebagai Puncak Rajo Imbang Langik yaitu nama seorang raja yang pernah bertahta di Pasaman pada masa silam.



Kabupaten Tanah Datar



Dasar Pembentukan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956

Ibukota

Batusangkar

Alamat Kantor Kepala Daerah

Jalan Sutan Alam Bagarsyah, Pagarurung,
Batusangkar

Alamat Kantor DPRD

Jl. S. A. Baggarsyah, Pagaruyung, Tj. Emas,
Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat
27281

Luas Wilayah

1.366 km²

Jumlah Penduduk (2017)

367.754 jiwa

Jumlah Wilayah Administrasi

14 Kecamatan, 75 Nagari
39 SKPD dan 2 BUMD

Batas Wilayah

Utara : Kabupaten Agam dan
Kabupaten Lima Puluh Kota
Selatan : Kota Sawahlunto dan
Kabupaten Solok.
Barat : Kabupaten Padang Pariaman
Timur : Kabupaten Sijunjung

Website

www.tanahdatar.go.id

Pimpinan Dewan

Ketua DPRD : H. Roni Mulyadi Dt. Bungsu, S.E.

Wakil I : Saidani, S.P.

Wakil II : Anton Yondra, S.E.

Pimpinan Daerah

Kepala Daerah : Drs. H. Irdinansyah Tarmizi

Wakil Kepala Daerah : H. Zulfadri Darma, S.H.

Sekretaris Daerah : Irwandi, S.IP., M.Si.

Inspektur : Drs. Altri Suandi

Neraca Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014-2018

Tahun	Aset (Rp)	Kewajiban (Rp)	Ekuitas (Rp)
2018	1.254.031.334.684,26	23.648.331.227,33	1.230.383.003.456,93
2017	1.221.308.168.072,66	17.900.041.117,43	1.203.408.126.955,23
2016	1.226.234.064.490,94	10.332.825.032,00	1.215.901.239.458,94
2015	1.180.359.290.149,18	5.737.892.298,00	1.174.621.397.851,18
2014	1.055.630.792.694,86	11.783.224.704,60	1.043.847.567.990,26

Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Tanah Datar TA 2014-2018

Tahun	Anggaran		Realisasi	
	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)
2018	1.297.477.371.741,00	985.570.348.302,21	1.230.335.931.942,65	841.216.200.263,05
2017	1.263.434.519.543,00	1.176.218.428.084,23	1.224.559.427.709,56	1.052.495.045.304,58
2016	1.241.491.032.825,00	1.236.746.178.356,85	1.188.763.795.259,84	1.106.141.805.486,46
2015	1.139.662.196.931,00	1.167.510.347.645,96	1.151.898.266.368,89	1.033.176.232.576,00
2014	1.004.767.570.838,00	1.087.354.767.167,27	1.004.720.140.165,69	971.007.739.987,00

Luhak Nan Tuo, nama lain dari Kabupaten Tanah Datar. Masyarakat Minangkabau meyakini bahwa asal usul orang Minangkabau dari Kabupaten Tanah Datar, tepatnya dari Dusun Tuo Pariangan, Kecamatan Pariangan.

Banyak bukti yang masih terdapat di Kabupaten Tanah Datar ini seperti Sawah Satampang Baniah, Lurah Nan Indak Barangin, Galundi Nan Baselo, dan Kuburan Panjang Datuk Tantejo Gurhano yang dikenal sebagai arsitek rumah gadang. Kemudian dari Luhak Tanah Datar inilah kemudian orang Minangkabau berkembang dan berpindah ke daerah lain seperti Luhak 50 kota dan Luhak Agam.

Di Kabupaten Tanah Datar saat ini masih banyak terdapat peninggalan sejarah adat Minangkabau tersebut, baik berupa benda maupun tatanan budaya adat Minangkabau. Ikrar “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” ini disebut juga dengan Sumpah Satie yang juga di Tanah Datar dilahirkan, yaitu tempatnya di Bukit Marapalam Puncak Pato, Kecamatan Lintau Buo Utara.

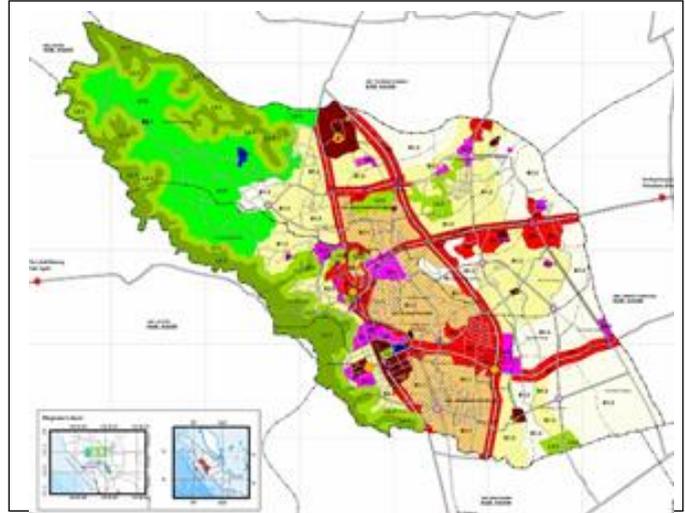
Kabupaten Tanah Datar sebagai tempat asal mula suku Minangkabau banyak sekali memiliki tempat sejarah. Industri wisata di Kabupaten Tanah Datar ini sangat potensial untuk dikembangkan.

Tempat wisata sejarah yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar ini antara lain Istana Pagaruyung, Balai ruang Sari, Puncak Pato, Prasasti Adityawarman, Batu Angkek-angkek, Rumah Gadang Balimbing, Kincir Air, Batu Basurek, Nagari Tuo Pariangan, Benteng van der Capellen, Batu Batikam, dan Istano Rajo.

Sedangkan untuk wisata alam dan budaya di Kabupaten Tanah Datar adalah Lembah Anai, Panorama Tabek Pateh, Desa Pariangan, Danau Singkarak Bukit Batu Patah, dan Ngalau Pangian.



Kota Bukittinggi



Dasar Pembentukan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956

Ibukota

Bukittinggi

Alamat Kantor Walikota

Bukit Gulai Bancah, Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Bukittinggi

Alamat Kantor DPRD

Jalan Khatib Sulaiman No.7, Aur Tajung Kang Tengah Sawah, Guguk Panjang, Aur Tajung Kang Tengah Sawah, Bukittinggi, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat 26138

Luas Wilayah

25,24 km²

Jumlah Penduduk (2017)

110.954 jiwa

Jumlah Wilayah Administrasi

3 Kecamatan dan 24 Kelurahan
29 SKPD dan 1 BUMD.

Batas Wilayah

- Utara : Nagari Gadut dan Kapau Kecamatan Tilatang Kamang
- Selatan : Nagari Taluak Kecamatan Banuhampu Sungai Puar
- Barat : Nagari Sianok, Tabek Sarajo, Guguk, Koto Gadang, Kecamatan IV Koto
- Timur : Nagari Ampang Gadang Kecamatan IV Angkat Canduang

Website

www.bukittinggikota.go.id

Pimpinan Dewan

Ketua DPRD : Herman Sofyan, S.E.

Wakil I : Nur Hasra, B.Sc.

Wakil II : Rusdi Nurman, S.H.

Pimpinan Daerah

Kepala Daerah : H.M. Ramlan Nurmatias, S.H.

Wakil Kepala Daerah : H. Irwandi, S.H.

Sekretaris Daerah : H. Yuen Karnova, S.E., M.M.

Inspektur : Amri, S.E.

Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2014-2018

Tahun	Aset (Rp)	Kewajiban (Rp)	Ekuitas (Rp)
2018	1.445.331.498.036,00	6.619.770.671,00	1.438.711.727.365,00
2017	1.515.282.417.304,37	3.426.642.672,67	1.511.855.774.631,70
2016	1.492.027.311.190,50	2.780.376.220,00	1.489.246.934.970,50
2015	1.443.534.285.031,71	2.919.583.554,91	1.440.614.701.476,80
2014	2.035.683.171.614,95	2.222.792.157,09	2.033.460.379.457,86

Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Kota Bukittinggi TA 2014-2018

Tahun	Anggaran		Realisasi	
	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)
2018	720.174.380.033,00	838.430.535.411,22	695.592.067.770,61	703.783.285.315,95
2017	710.125.538.263,16	732.873.501.966,34	653.374.887.189,69	590.090.904.897,65
2016	675.267.277.741,89	739.912.598.927,22	647.045.721.855,85	630.661.294.710,00
2015	611.264.389.203,00	685.879.275.666,48	593.323.296.014,34	579.102.342.041,49
2014	595.530.789.650,20	641.272.623.131,51	595.424.983.587,00	542.050.414.973,83

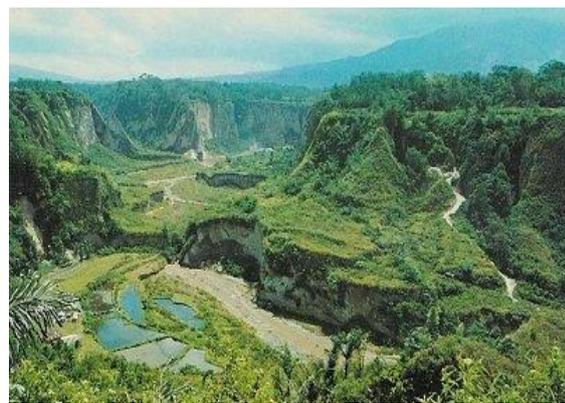
Industri pariwisata merupakan salah satu sektor andalan Kota Bukittinggi. Banyaknya objek wisata yang menarik, menjadikan kota ini dijuluki sebagai "kota wisata".

Ngarai Sianok merupakan salah satu objek wisata utama. Taman Panorama yang terletak di dalam kota Bukittinggi memungkinkan wisatawan untuk melihat keindahan pemandangan Ngarai Sianok. Di dalam Taman Panorama juga terdapat gua bekas persembunyian tentara Jepang sewaktu Perang Dunia II yang disebut dengan Lubang Jepang. Untuk mengunjungi nagari Koto Gadang di bawah ngarai, wisatawan bisa melalui Janjang Koto Gadang. Jenjang yang memiliki panjang sekitar 1 km ini, memiliki desain seperti Tembok Besar Tiongkok.

Di Taman Bundo Kanduang terdapat replika Rumah Gadang yang berfungsi sebagai museum kebudayaan Minangkabau. Kebun Binatang Bukittinggi dan Benteng Fort de Kock, dihubungkan oleh jembatan penyeberangan yang disebut Jembatan Limpapeh. Jembatan penyeberangan Limpapeh berada di atas Jalan A. Yani yang merupakan jalan utama di Kota Bukittinggi.

Pasar Ateh (Pasar Atas) berada berdekatan dengan Jam Gadang yang merupakan pusat keramaian kota. Di Pasar Ateh terdapat banyak penjual kerajinan tangan dan bordir, serta makanan kecil oleh-oleh khas Sumatra Barat.

Sedangkan untuk wisata kuliner Kota Bukittinggi menyediakan itiak mudo lado hijau dan makanan ringan seperti keripik sanjai.



Kota Payakumbuh



Dasar Pembentukan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956
tanggal 19 Maret 1956

Ibukota

Payakumbuh

Alamat Kantor Walikota

Jalan Sudirman 17, Payakumbuh

Alamat Kantor DPRD

Jl. Soekarno Hatta, Bulakan Balai Kandih,
Payakumbuh Bar., Kota Payakumbuh,
Sumatera Barat 26223

Luas Wilayah

80,43 km²

Jumlah Penduduk (2015)

133.639 jiwa

Jumlah Wilayah Administrasi

5 Kecamatan, 8 Nagari, 76 Kelurahan
31 SKPD dan 1 BUMD

Batas Wilayah

- Utara : Kecamatan Harau dan Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima puluh Kota
- Selatan : Kecamatan Luhak dan Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota
- Barat : Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota
- Timur : Kecamatan Luhak dan Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

Website

www.payakumbuhkota.go.id

Pimpinan Dewan

Ketua DPRD : Hamdi Agus, S.T.
Wakil I : Wulan Denura, S.ST.
Wakil II : Armen Faindal, S.H.

Pimpinan Daerah

Kepala Daerah : Riza Falepi, S.T., M.T.
Wakil Kepala Daerah : H. Erwin Yunaz, S.E., M.M.
Sekretaris Daerah : Drs. Rida Ananda, M.Si.
Inspektur : Andri Narwan

Neraca Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2014-2018

Tahun	Aset (Rp)	Kewajiban (Rp)	Ekuitas (Rp)
2018	1.236.485.392.786,00	9.160.313.968,00	1.227.325.078.818,00
2017	1.130.891.630.860,00	7.943.925.414,00	1.122.947.705.446,00
2016	1.054.710.869.365,00	11.449.598.588,00	1.043.261.270.777,00
2015	931.739.337.539,00	4.987.698.351,00	926.751.639.188,00
2014	1.209.901.212.890,17	1.438.417.322,00	1.208.462.795.568,17

Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Kota Payakumbuh TA 2014-2018

Tahun	Anggaran		Realisasi	
	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)
2018	723.204.712.708,00	793.750.959.949,00	708.532.769.024,00	715.317.536.552,00
2017	746.928.793.801,00	749.389.556.066,00	739.010.301.393,00	693.724.127.002,00
2016	721.538.408.135,00	785.019.939.503,00	717.632.636.495,00	740.534.383.683,00
2015	686.014.632.983,00	743.643.185.414,00	703.922.042.002,00	692.842.346.896,00
2014	603.584.940.786,00	653.771.350.803,00	603.642.162.181,33	593.640.727.396,00

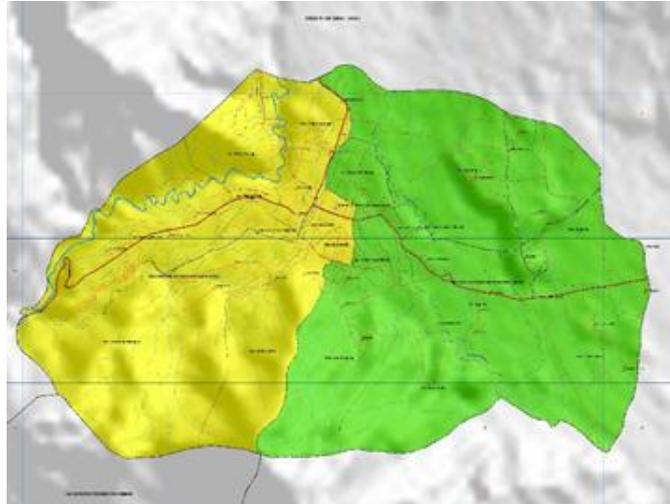
Kota Payakumbuh merupakan kota penghubung antara Kota Padang dan Kota Pekanbaru. Sebagai kota persinggahan, andalan Kota Payakumbuh adalah sektor perdagangan dan jasa.

Sektor pariwisata Kota Payakumbuh berfokus pada wisata alam dan wisata sejarah. Wisata alam yang dapat ditemui di kota ini antara lain Ngalau Indah, Ngalau Sompik, Puncak Simarajo, dan Panorama Ampangan. Sedangkan wisata sejarah di kota ini antara lain Masjid Tuo Koto Nan Ompek, Masjid Gadang Balai Nan Duo Koto Nan Ompek, Museum Tan Malaka, Rumah Gadang Tuanku Lareh Koto Nan Ompek, dan perkampungan tradisional Minangkabau.

Adapun makanan khas dari Kota Payakumbuh antara lain botiah, galamai, boreh rondang, kipang, dan paniaram. Buah tangan yang dapat dibawa dari Kota Payakumbuh adalah pandai sikek dan silungkang karena Kota Payakumbuh merupakan pusat *home industry* untuk kerajinan tersebut.



Kota Padang Panjang



Dasar Pembentukan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956
tanggal 23 Maret 1956

Ibukota

Padang Panjang

Alamat Kantor Kepala Daerah

Jalan Sutan Syahrir 178, Padang Panjang

Alamat Kantor DPRD

Jl. H. Agus Salim No.7 RT. IX Kel. Guguk
Malintang, Guguk Malintang, Padang
Panjang Tim., Kota Padang Panjang,
Sumatera Barat 17112

Luas Wilayah

23 km²

Jumlah Penduduk (2010)

104.499 jiwa

Jumlah Wilayah Administrasi

2 Kecamatan, 16 Kelurahan

27 SKPD dan 3 BUMD (1 BUMD tidak aktif)

Batas Wilayah

Utara :Kecamatan X Koto

Selatan :Kecamatan X Koto

Barat : Kecamatan X Koto

Timur : Kecamatan Batipuh

Website

www.padangpanjang.go.id

Pimpinan Dewan

Ketua DPRD : Mardiansyah, A.Md.

Wakil I : Yulius Kaisar

Wakil II : Imral, S.E.

Pimpinan Daerah

Kepala Daerah : H. Fadly Amran, BBA.

Wakil Kepala Daerah : Drs. Asrul

Sekretaris Daerah : Sonny Budaya Putra, AP., M.Si.

Inspektur : Dr. Syahril, S.H., M.H.

Neraca Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014-2018

Tahun	Aset (Rp)	Kewajiban (Rp)	Ekuitas (Rp)
2018	1.222.738.376.767,29	11.317.016.775,75	1.211.421.359.991,54
2017	1.229.689.322.425,15	42.920.562.264,94	1.186.768.760.160,21
2016	1.035.374.746.534,74	5.926.264.203,00	1.029.448.482.331,74
2015	923.542.356.293,70	5.739.516.177,00	917.802.840.116,70
2014	914.062.887.676,59	5.098.212.959,67	908.964.674.716,59

Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Kota Padang Panjang TA 2014-2018

Tahun	Anggaran		Realisasi	
	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)
2018	573.797.764.727,68	701.850.668.309,75	553.788.839.709,53	612.982.009.674,00
2017	609.996.061.007,00	755.087.398.631,39	591.062.889.679,67	607.630.104.037,99
2016	560.907.764.325,11	704.923.834.833,89	549.936.359.823,02	548.357.928.458,41
2015	497.538.427.917,50	630.044.257.350,47	505.170.035.889,81	490.897.484.558,00
2014	478.219.616.171,00	544.621.698.906,64	475.280.788.657,33	406.617.041.960,00

Kota ini memiliki julukan sebagai Kota Serambi Mekkah, dan juga dikenal sebagai *Mesir van Andalus (Egypte van Andalus)*.

Kota Padang Panjang termasuk kota yang biasa-biasa saja tanpa memiliki potensi daerah yang signifikan. Namun dengan posisi strategis sebagai kota persinggahan, pemerintah kota Padang Panjang menitik beratkan sektor perdagangan dan jasa dalam meningkatkan pendapatan perkapitanya.

Pada kota ini terdapat Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM) yang terletak berdampingan dengan objek wisata Perkampungan Minangkabau (*Minang Village*) yang menyediakan berbagai informasi dan dokumentasi tentang sejarah dan budaya Minangkabau baik berupa buku-buku, *microfilm*, foto dan sebagainya.

Selain itu pada kota ini juga terdapat kawasan rekreasi keluarga yang dikenal dengan Mifan yang terdiri dari taman air dengan wahana kolam ombak, kolam arus, kolam renang khusus wanita, kolam renang khusus anak-anak, ember tumpah dan slide tower. Saat ini Pemkot Padang Panjang berencana untuk membangun kereta gantung dari kawasan Lembah Anai hingga ke lokasi Mifan di kawasan Silaing Bawah.



Kabupaten Agam



Dasar Pembentukan

Undang-undang No. 12 Tahun 1956

Ibukota

Lubuk Basung

Alamat Kantor Bupati

Jalan Sudirman No. 1 Padang Baru Lubuk Basung

Alamat Kantor DPRD

Jalan Jend. Sudirman, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat 26452

Luas Wilayah

2.232,30 km²

Jumlah Penduduk (2015)

476.881 jiwa

Jumlah Wilayah Administrasi

16 Kecamatan, 82 Nagari

27 OPD, 1BUMD, 1 BLUD

Batas Wilayah

Utara : Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat

Selatan : Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Tanah Datar.

Barat : Samudera Hindia

Timur : Kabupaten Lima Puluh Kota

Website

www.agamkab.go.id

Pimpinan Dewan

Ketua DPRD : Novi Irwan, S.Pd., M.M.

Wakil I : Suharman

Wakil II : Marga Indra Putra, S.Pd.

Wakil III : Irfan Amran

Pimpinan Daerah

Kepala Daerah : Dr. Ir. H. Indra Catri, M.S.P.

Wakil Kepala Daerah : Trinda Farhan Satria, S.T., M.T.

Sekretaris Daerah : Drs. Martias Wanto, M.M.

Inspektur : Dafrines, S.E.

Neraca Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2014-2018

Tahun	Aset (Rp)	Kewajiban (Rp)	Ekuitas (Rp)
2018	1.935.999.446.525,01	16.900.401.663,78	1.919.099.044.861,23
2017	1.895.241.067.342,76	14.476.164.042,00	1.880.764.903.300,76
2016	1.914.637.755.556,77	14.391.110.841,42	1.900.246.644.715,35
2015	1.810.456.827.947,84	5.489.374.428,00	1.804.967.453.519,84
2014	2.993.714.810.064,15	3.068.684.115,00	2.990.646.125.949,15

Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Agam TA 2014-2018

Tahun	Anggaran		Realisasi	
	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)
2018	1.430.853.431.924,49	1.198.186.411.292,00	1.390.233.385.516,01	1.103.111.883.976,00
2017	1.409.522.316.338,00	1.194.327.703.589,50	1.377.484.418.822,87	1.108.720.993.539,00
2016	1.387.389.442.419,00	1.348.072.329.885,51	1.349.740.830.327,14	1.226.631.766.103,26
2015	1.267.037.168.618,00	1.298.761.884.951,36	1.275.212.405.967,86	1.179.714.975.210,90
2014	1.120.309.898.823,00	1.193.332.329.568,44	1.131.908.539.063,62	1.095.866.788.857,65

Saat ini, perekonomian Kabupaten Agam dibentuk oleh sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pertambangan, pariwisata, dan industri. Mata pencaharian utama dari penduduk Kabupaten Agam adalah bidang pertanian. Komoditi andalan perkebunan Kabupaten Agam adalah kelapa sawit. Sektor pariwisata Kabupaten Agam mengandalkan wisata alam seperti daerah lain di Sumatera Barat, antara lain Danau Maninjau, Puncak Lawang dan XIII Nan Basa, Air Terjun Badorai, Pantai Ujung Karang, Kelok 44, Aia Tigo Raso, Taman Wisata Muko-Muko, dan Ngalau Tarang.



Galeri Foto

